

# Suara Hidayah

**PENERBIT**  
Divisi Penerangan Al Furqon

**PELINDUNG**  
Ketua Al Furqon

**PENANGGUNG JAWAB**  
Ka. PPH Al Furqon

**PEMIMPIN REDAKSI**  
Sie. Penerangan Al Furqon

**DEWAN REDAKSI**

**PRODUKSI**  
Kamal

**SIRKULASI**  
Anshori

**EDITOR / LAYOUT**

**KEUANGAN**

**DOKUMENTASI**

**ALAMAT**  
Komp. Al Furqon di Bumi Allah NII

**e-mail**

*Seluruh naskah yang masuk ke meja Redaksi menjadi hak penuh Redaksi Untuk kalangan sendiri*

# iftitah

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ucapan syukur yang tak terhingga kita panjatkan ke Hadhirat Ilahi Robbi bahwa atas petunjuk dan pertolongan-Nya Suara Hidayah Edisi Khusus ini akhirnya bisa kami terbitkan bertepatan dengan hari lahir Lembaga kita, 7 Agustus.

Sesungguhnya banyak kendala dan keterbatasan kemampuan yang dialami oleh Dewan Redaksi dalam menggarap Edisi Khusus ini. Jika tidak atas pertolongan-Nya mustahil upaya ini bisa terwujudkan. Setelah mengalami beberapa proses penyusunan naskah dan atas dasar konsultasi dengan beberapa tokoh di Lembaga kita, maka Dewan Redaksi berketetapan hati untuk mengambil tema "*Antara Dua Proklamasi*".

Sejarah emas perjuangan umat Islam Bangsa Indonesia yang melahirkan Proklamasi 7 Agustus 1949, sesungguhnya merupakan akumulasi penolakan terhadap Republik sekuler yang diproklamkan 17 Agustus 1945. Adalah suatu kenyataan pahit yang dialami umat Islam bangsa Indonesia ketika Proklamasi 17 Agustus 1945 mengisyaratkan sebuah pengkhianatan atas hati nurani Umat Islam Bangsa Indonesia, sehingga bertitik tolak dari peristiwa itu muncullah upaya dari pejuang Islam untuk menzhahirkan Kalimatillah di muka bumi Indonesia.

Perjuangan terus berlanjut...! Entah sampai kapan, hanya Alloh yang Maha Tahu. Tetapi proses akan terus berkesinambungan seiring bolak baliknya zaman. Kita berharap pertolongan Alloh tetap menyertai kita. Aamiin..!

**Wassalam**

**Redaksi**

Keluarga Besar  
**Al Munawaroh**  
Mengucapkan  
Rasa Syukur Atas Anugerah-Nya  
Bahwa Kini NKA-NII telah berusia  
55 Tahun, sejak  
Proklamasi 7 Agustus 1949  
Semoga Kiranya Allah SWT  
Senantiasa Melimpahkan Tolong dan  
Karunia-Nya Pada Segenap  
Mujahid/Mujahidah Yang Senantiasa  
Istiqomah Berada Dalam Barisan-Nya

Dirgahayu

**Negara Kurnia Allah, Negara Islam Indonesia**

**Yang Ke - 55**

**7 Agustus 1949 – 7 Agustus 2004**

**Ya Allah, jadikan Negeri kami, Negeri yang  
aman dan kuat untuk menegakkan Kalimat-Mu**

**Keluarga Besar Al Furqon**

**Sambutan Penerbit  
Atas Terbitnya Suara Hidayah Edisi Khusus  
7 Agustus 2004**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Bismillahirrohmannirrohiim.

Segala puji tentunya hanya bagi Allah Robb bagi sekalian alam, sholawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya dan sahabatnya.

Pertama-tama saya atas nama warga Al Balad mengucapkan terima kasih, jazakallohu khoiron katsiron kepada Dewan Redaksi Suara Abadi khususnya dan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi atas terbitnya Edisi Khusus ini.

Semoga dengan terbitnya Edisi Khusus ini akan bertambahnya wawasan untuk mengenal lebih jauh tentang "Sejarah Kelembagaan", dan terutama dalam menapakkan langkah di Negeri Islam Berjuang.

Dengan penuh harapan semoga buletin Suara Abadi mampu menyajikan rubrik-rubrik yang sifatnya bisa memotivasi agar warga menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai khalifah fil ardh. Yang tentunya dituntut kesadarannya untuk bertanggung jawab atas jalannya roda pembangunan ini. Kalau boleh kita bicara jujur hari ini kita masih melihat warga yang kadar kedisiplinannya masih minim.

Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan, warga harus disadarkan jangan sampai mengganggu proses nafas perjuangan yang sedang kita benahi.

Untuk itu saya mengharapkan semoga buletin Edisi Khusus ini, yang bertema tulisan "Antara Dua Proklamasi", mampu membuka wawasan bagi seluruh warga yang sedang membangun peradaban

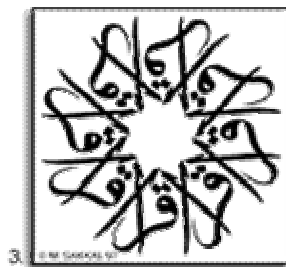
dan kebudayaan Islam, kaya akan gagasan sehingga mampu memberikan wacana dalam berbagai kegiatan kelembagaan, yang tentunya diharapkan memberikan hal yang bermanfaat bagi warga dan lembaga.

Terakhir, saya serukan kepada seluruh warga Al Balad bergeraklah untuk maju menyongsong masa depan yang lebih baik. Sekalipun kalian berada di jalan yang benar, tidak akan menjadi bermakna ketika keberadaan saudara di jalan tersebut hanya sekedar berdiam diri menanti pagi mengharap malam.

Rosululloh bersabda : *"Sukakah kalian kutunjukkan apa itu pokok? Apa itu tiang? Dan juga apa itu puncaknya agama? Rosululloh kemudian menjelaskan, pokok agama itu Islam, tiangnya agama adalah Shalat, dan puncaknya agama adalah Jihad".* (HR. Bukhari & Muslim).

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Bumi Allah NII,  
20 J. Tsani 1425 H/ 7 Agustus 2004 M  
**Penerbit**



# Memahami Kembali Sejarah Darul Islam Indonesia

**Manipulasi sejarah merupakan bagian dari politik kekuasaan.  
Akankah kita selalu terjebak dalam pemahaman yang salah ?**

**M**engungkapkan sejarah perjuangan Darul Islam di Indonesia, sama pentingnya dengan mengungkap kan kebenaran. Sebab perjalanan sejarah gerakan ini telah banyak dimanipulasi, bahkan berusaha ditutup-tutupi oleh penguasa. Rezim orde lama dan kemudian orde baru, mengalami sukses besar dalam membohongi serta menyesatkan kaum muslimin khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya dalam memahami sejarah masa lalu negeri ini.

Selama ini kita telah tertipu membaca buku-buku sejarah serta berbagai publikasi sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Sukses besar yang diperoleh dua rezim penguasa di Indonesia dalam mendistorsi (mengaburkan) sejarah Darul Islam, adalah munculnya trauma politik di kalangan umat Islam. Hampir seluruh kaum muslimin di negeri ini, memiliki semangat untuk memperjuangkan agamanya, bahkan seringkali terjadi hiruk pikuk di ruang diskusi maupun seminar untuk hal tersebut. Tetapi begitu tiba-tiba memasuki pembicaraan menyangkut perlunya endirikan Negara Islam, kita akan menyaksikan segera setelah itu mereka akan menghindar dan bungkam seribu bahasa.

Di masa akhir-akhir ini, bahkan semakin banyak tokoh-tokoh Islam yang menampakkan ketakutannya terhadap persoalan Negara Islam. Mantan Ketua

Umum PBNU, K.H. Abdurrahman Wahid misalnya, secara terus terang bahkan mengatakan : "Musuh utama saya adalah

Islam kanan, yaitu mereka yang menghendaki Indonesia berdasarkan Islam dan menginginkan berlakunya syari'at Islam". (Republika, 22 September 1998, hal. 2 kolom 5). Selanjutnya ia katakan : "Kita akan menerapkan sekularisme, tanpa mengatakan hal itu sekularisme".

Salah satu partai berasas Islam yang lahir di era reformasi ini, malah tidak bisa menyembunyikan ketakutannya sekalipun dibungkus dalam retorika melalui slogan gagah: "Kita tidak memerlukan negara Islam. Yang penting adalah negara yang Islami". Bahkan, dalam suatu pidato politik, presiden partai tersebut mengatakan: "Bagi kita tidak masalah, apakah pemimpin itu muslim atau bukan, yang penting dia mampu mengaplikasikan nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan".

Demikian besar ketakutan kaum muslimin terhadap isu negara Islam, melebihi ketakutan orang-orang kafir dan sekuler, sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa segala isme (faham) atau pun Ideologi di dunia ini berjuang meraih kekuasaan untuk mendirikan negara berdasarkan isme atau ideologi yang dianutnya.

Selama 32 tahun berkuasanya rezim Soeharto, sosialisasi tentang Negara Islam Indonesia seakan terhenti. Oleh karena itu adanya bedah buku atau pun terbitnya buku-buku yang mengungkapkan manipulasi sejarah ini, merupakan perbuatan luhur dalam meluruskan distorsi sejarah yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari khazanah sejarah bangsa.

Sejak berdirinya Republik Indonesia, rakyat negeri umumnya telah ditipu oleh penguasa hingga saat sekarang. Umat Islam yang menduduki jumlah mayoritas telah disesatkan pemahamannya mengenai sejarah perjuangan Islam itu sendiri. Sudah seharusnya, di masa reformasi ini, umat Islam menyadari bahwa di Indonesia pernah ada suatu gerakan anak bangsa yang berusaha membangun supremasi Islam, yaitu Negara Islam Indonesia yang berhasil diproklamasikan, 7 Agustus 1949, dan berhasil mempertahankan eksistensinya hingga 13 tahun lamanya (1949-1962). Namun rezim yang berkuasa telah memanipulasi sejarah tersebut dengan seenaknya, sehingga umat Islam sendiri tidak mengenal dengan jelas sejarah masa lalunya.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, adalah sebuah nama yang cukup problematis dan kontroversial di negara Indonesia, dari dulu hingga saat ini. Bahwa dia dikenal sebagai pemberontak, harus kita luruskan. Bukan saja demi membetulkan fakta sejarah yang keliru atau sengaja dikelirukan, tetapi juga supaya kezaliman sejarah tidak terus berlanjut terhadap seorang tokoh yang seharusnya dihormati.

Semasa Orla berkuasa, yang merupakan puncaknya perjuangan Negara Islam Indonesia, SM. Kartosoewirjo memang

dikenal sebagai pemberontak. Tetapi fakta yang sebenarnya adalah, Kartosoewirjo sesungguhnya tokoh penyelamat bagi bangsa Indonesia, lebih dari apa yang dilakukan oleh Soekarno dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Pada waktu Soekarno bersama tentara Republik pindah ke Yogyakarta sebagai akibat dari perjanjian Renville, yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia hanya tinggal Yogya dan sekitarnya saja, dan wilayah yang masih tersisa itu pun, dipersengketakan antara Belanda dan Indonesia, sehingga pada waktu itu nyaris Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Dan yang ada hanyalah negara-negara serikat, baik yang sudah terbentuk, atau pun yang masih dalam proses melengkapi syarat-syarat kenegaraan. Seperti Jawa Barat, ketika itu dianjurkan oleh Belanda supaya membentuk Negara Pasundan, namun belum terbentuk sama sekali, karena belum adanya kelengkapan kenegaraan.

Ketika segala peristiwa yang telah disebutkan di atas, menggelayuti atmosfer politik Nusantara, pada saat itu Indonesia dalam keadaan *vacuum of power*. Pada saat itulah, Soekarno memerintahkan semua pasukan untuk pindah ke Yogyakarta berdasarkan perjanjian Renville. Guna memberi legitimasi Islami, dan untuk menipu umat Islam Indonesia dalam memindahkan pasukan ke Yogya, Soekarno telah memanipulasi terminologi al-Qur'an dengan menggunakan istilah "*Hijrah*" untuk menyebut pindahnya pasukan Republik, sehingga nampak Islami dan tidak terkesan melarikan diri. Namun S.M. Kartosoewirjo dengan pasukannya tidak mudah tertipu, dan menolak untuk pindah ke Yogya. Bahkan bersama pasukannya, ia berusaha mempertahankan wilayah Jawa Barat, dan menamakan Soekarno dan

pasukannya sebagai pasukan liar yang kabur dari medan perang.

Jauh sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1930-an, istilah "*Hijrah*" sudah pernah diperkenalkan, dan dipergunakan sebagai metode perjuangan modern yang brilliant oleh S.M. Kartosoewirjo, berdasarkan tafsirnya terhadap sirah Nabawiyah. Ketika itu, pada tahun 1934 telah muncul dua metode perjuangan yaitu kooperatif dan non kooperatif. Metode non kooperatif, artinya tidak mau masuk ke dalam parlemen dan bekerja sama dengan pemerintah Belanda namun bersifat pasif, tidak berusaha menghadapi penguasa yang ada. Metode ini sebenarnya dipengaruhi oleh politik SWADESI, politik Mahatma Gandhi dari India. Lalu muncullah S.M. Kartosoewirjo dengan metode Hijrah, sebuah metode yang berusaha membentuk komunitas sendiri, tanpa kerjasama dan aktif, berusaha untuk melawan kekuatan penjajah.

Akan tetapi, pada waktu itu, metode ini dikedam keras oleh Agus Salim, karena menganggap S.M. Kartosoewirjo menerapkan metode hijrah ini di dalam suatu masyarakat yang belum melek politik. Sehingga ia kemudian berusaha menanamkan politik dan metode hijrah itu kepada anggota PSII pada khususnya. Dengan harapan setelah memahami politik, mereka mau menggunakan metode ini, karena paham politik sangat penting. Namun, Agus Salim menolaknya, karena ia tidak setuju dengan politik tersebut. Menurutny rakyat atau anggota partai hanyalah boleh mengetahui masalah mekanisme organisasi tanpa mengetahui konstelasi politik yang sedang berlangsung, dan hanya elit pemimpin saja yang boleh mengetahui. Sedangkan "*Hijrah*" adalah berusaha menarik diri dari perdebatan

politik, kemudian berusaha membentuk barisan tersendiri dan berusaha dengan kekuatansendiri untuk mengantisipasi sistem perjuangan yang tidak cukup progresif dan tidak Islami. Faktor inilah yang menjadi awal perpecahan PSII, yaitu melahirkan PSII Hijrah yang memakai metode hijrah dan PSII Penyadar yang dipimpin Agus Salim.

Walaupun metode Hijrah, bagi sebagian tokoh politik saat itu, terlihat mustahil untuk digunakan sebagai metode perjuangan, namun ternyata dapat berjalan efektif pada tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan di bawah bendera Bismillahirrahmaniirrahim. Sehingga pantaslah, jika kita tidak memperhatikan rangkaian sejarah sebelumnya secara seksama, memunculkan anggapan bahwa berdirinya Negara Islam Indonesia berarti adanya negara di dalam negara, karena Proklamasi RI pada tahun 1945 telah lebih dahulu dilakukan.

Namun sebenarnya jika kita memahami sejarah secara benar dan adil, maka kedudukan Negara Islam Indonesia dan RI adalah negara dengan negara. Karena negara RI hanya tinggal wilayah Yogyakarta waktu itu, sementara Negara Islam Indonesia berada di Jawa Barat dan mengalami ekspansi (pemekaran) wilayah. Daerah Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia. Dan dukungan itu bukan hanya berupa pernyataan atau retorika belaka, tapi ikut bergabung secara revolusioner. Barangkali benar, bahwa Negara Islam Indonesia adalah satu-satunya gerakan rakyat yang disambut demikian meriah di beberapa daerah di Indonesia.

Melihat sambutan yang gemilang hangat dari saudara muslim lainnya, maka rezim Soekarno berusaha untuk menghambat tegaknya Negara Islam Indonesia bersama A.H. Nasution, seorang tokoh militer beragama Islam yang dibanggakan hingga kontribusi yang ternyata mempunyai dampak yang negatif dalam perkembangan Negara Islam Indonesia. Dia bersama Soekarno berusaha menutupi segala hal yang memungkinkan S.M. Kartosoewirjo dan Negara Islam Indonesia kembali terangkat dalam masyarakat, seperti penyembunyian tempat eksekusi dan makam mujahid Islam tersebut.

Tampaklah sekarang bahwa sebenarnya penguasa Orla dan Orba, telah melakukan kejahatan politik dan sejarah sekaligus, yang dosanya sangat besar yang rasanya sulit untuk dimaafkan. Mungkin bisa diumpamakan, hampir sama dengan dosa syirik dalam pengertian agama, yang merupakan dosa terbesar dalam Islam. Karena perilaku politik yang mereka pertontonkan, telah menyesatkan masyarakat dalam memahami sejarah perjuangan Islam di Indonesia dengan sebenarnya. Berbagai rekayasa politik untuk memanipulasi sejarah telah dilakukan sampai hal yang sekecil-kecilnya mengenai perjuangan serta pribadi S.M. Kartosoewirjo. Seperti perubahan data keluarganya, tanggal dan tahun lahirnya. Semua itu ditujukan agar SMK dan Negara Islam Indonesia jauh dari ingatan masyarakat.

Sekalipun demikian, S.M. Kartosoewirjo tidak berusaha membalas tindakan dzalim pemerintah RI. Pernah suatu ketika Mahkamah Agung (Mahadper) menawarkan untuk mengajukan permohonan grasi (pengampunan) kepada presiden Soekarno, supaya hukuman mati

yang telah dijatuhkan kepadanya dibatalkan, namun dengan sikap ksatria ia menjawab," Saya tidak akan pernah meminta ampun kepada manusia yang bernama Soekarno".

Kenyataan ini pun telah dimanipulasi. Menurut Holk H. Dengel dalam bukunya berbahasa Jerman, dan dalam terjemahan Indonesia berjudul: "Darul Islam dan Kartosoewirjo, Angan-angan yang gagal", mengakui bahwa telah terjadi manipulasi data sejarah berkenaan dengan sikap Kartosoewirjo menghadapi tawaran grasi tersebut. Tokoh sekaliber Kartosoewirjo tidak mungkin minta maaf, namun ketika kita baca dalam terjemahannya yang diterbitkan oleh Sinar Harapan telah diubah sebaliknya, bahwa Kartosoewirjo meminta ampun kepada Soekarno, dan kita tahu Sinar Harapan adalah bagian dari kekuatan Kristen yang bahu-membahu dengan penguasa sekuler dalam mendistorsi sejarah Islam.

Dalam majalah Tempo 1983, pernah dimuat kisah seorang petugas eksekusi S.M. Kartosoewirjo, yang menggambarkan sikap ketidakpedulian Kartosoewirjo atas keputusan yang ditetapkan Mahadper RI kepadanya. Ia mengatakan bahwa 3 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, Kartosoewirjo tertidur nyenyak, padahal petugas eksekusinya tidak bisa tidur sejak 3 hari sebelum pelaksanaan hukuman mati. Dari sinilah akhirnya diketahui kemudian dimana pusara Kartosoewirjo berada, yaitu di pulau Seribu.

Usaha untuk mengungkapkan manipulasi sejarah adalah sangat berat. Satu di antara fakta sejarah yang dimanipulasi, adalah untuk mengungkap kebenaran teks proklamasi dan UUD Negara Islam Indonesia adalah jiplakan dari proklamasi

Soekarno-Hatta. Yang sebenarnya terjadi justru kebalikannya. Ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom (6 - 9 Agustus 1945) S.M. Kartosoewirjo sudah tahu melalui berita radio, sehingga ia berusaha memanfaatkan peluang ini untuk sosialisasi proklamasi Negara Islam Indonesia. Ia datang ke Jakarta bersama pasukan Hisbullah dan mengumpulkan massa guna mensosialisasikan kemungkinan berdirinya Negara Islam Indonesia, dan rancangan konsep proklamasi Negara Islam Indonesia kepada masyarakat. Sebagai seorang tokoh nasional yang pernah ditawarkan sebagai menteri pertahanan muda yang kemudian ditolaknya, melakukan hal ini tentu bukan perkara sulit. Salah satu di antara massa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Ahmad Subarjo.

Mengetahui banyaknya dukungan terhadap sosialisasi ini, mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok agar mempercepat proklamasi RI sehingga Negara Islam Indonesia tidak jadi tegak. Bahkan dalam bukunya, Holk H. Dengel menyebutkan tanggal 14 Agustus 1945 Negara Islam Indonesia telah di proklamirkan, tetapi yang sebenarnya baru sosialisasi saja. Ketika di Rengasdengklok Soekarno menanyakan kepada Ahmad Soebardjo, sebagaimana ditulis Mr. Ahmad Soebardjo dalam bukunya "Lahirnya Republik Indonesia".

Pertanyaan Soekarno itu adalah: "Masih ingatkah saudara, teks dari bab Pembukaan Undang-Undang Dasar kita?"

"Ya saya ingat, saya menjawab,"Tetapi tidak lengkap seluruhnya".

"Tidak mengapa," Soekarno bilang, "Kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang

menyangkut Proklamasi dan bukan seluruh teksnya".

Soekarno kemudian mengambil secarik kertas dan menuliskan sesuai dengan apa yang saya ucapkan sebagai berikut : "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan".

Jika kesaksian Ahmad Soebardjo ini benar, jelas tidak masuk akal, karena kita tahu bahwa UUD 1945 baru disahkan dan disetujui tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi. Sehingga pertanyaan yang benar semestinya adalah, "Masih ingatkah saudara akan sosialisasi proklamasi Negara Islam Indonesia?" Maka wajarlah jika naskah Proklamasi RI yang asli terdapat banyak coretan. Jelaslah bahwa ternyata Soekarno-Hatta yang menjiplak konsep naskah proklamasi Negara Islam Indonesia, dan bukan sebaliknya. Memang sedikit sejarawan yang mengetahui mengenai kebenaran sejarah ini. Di antara yang sedikit itu adalah Ahmad Mansyur Suryanegara, beliau pernah mengatakan bahwa S.M. Kartosoewirjo pernah datang ke Jakarta pada awal Agustus 1945 bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah.

"Sebenarnya, sebelum hari-hari menjelang proklamasi RI tanggal 17 Agustus 1945, Kartosoewirjo telah lebih dahulu menebar aroma deklarasi kemerdekaan Islam, ketika kedatangannya pada awal bulan Agustus setelah mengetahui bahwa persetujuan antara Jepang dan Amerika memuncak dan menjadi bumerang bagi Jepang. Ia datang ke Jakarta bersama dengan beberapa orang pasukan laskar Hisbullah, dan segera bertemu dengan beberapa elit pergerakan atau kaum nasionalis untuk memperbincangkan peluang yang mesti diambil guna mengakhiri dan sekaligus mengubah determinisme sejarah rakyat



Indonesia. Untuk memahami mengapa pada tanggal 16 Agustus pagi Hatta dan Soekarno tidak dapat ditemukan di Jakarta, kiranya *Historical Inquiry* (penelitian sejarah) berikut ini perlu diajukan: Mengapa Soekarno dan Hatta mesti menghindari begitu jauh ke Rengasdengklok padahal Jepang memang sangat menyetujui persiapan kemerdekaan Indonesia? Mengapa ketika Soebardjo ditanya Soekarno, apakah kamu ingat pembukaan Piagam Jakarta? Mengapa jawaban yang diberikan dimulai dengan kami bangsa Indonesia ...? Bukankah itu sesungguhnya adalah rancangan Proklamasi yang sudah dipersiapkan Kartosoewirjo pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945 kepada mereka? Pada malam harinya mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda, yaitu Soekarno dan Ahmad Soebardjo, ke garnisun PETA di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang terletak di sebelah barat kota Karawang, dengan dalih melindungi mereka bilamana meletus suatu pemberontakan PETA dan HEIHO. Ternyata tidak terjadi suatu pemberontakan pun, sehingga Soekarno dan Hatta segera menyadari bahwa kejadian ini merupakan suatu usaha memaksa mereka supaya menyatakan kemerdekaan di luar rencana pihak Jepang, tujuan ini mereka tolak. Laksamana Mada mengirim kabar bahwa jika mereka dikembalikan dengan selamat maka dia dapat mengatur agar pihak Jepang tidak menghiraukan bilamana kemerdekaan dicanangkan. Mereka mempersiapkan naskah proklamasi hanya berdasarkan ingatan tentang konsep proklamasi Islam yang dipersiapkan SM. Kartosoewirjo pada awal bulan Agustus 1945. Maka, seingat Soekarno dan Ahmad Soebardjo, naskah itu didasarkan pada bayang-bayang konsep proklamasi dari S.M. Kartosoewirjo, bukan pada konsep pembukaan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI atau PPKI." (Al

Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo, hal. 65, Pen. Darul Falah, Jakarta).

Demikianlah, berbagai manipulasi sejarah yang ditimpakan kepada Darul Islam dan pemimpinnya, sedikit demi sedikit mulai tersibak, sehingga dengan ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir dan membangun kesadaran historis para pembaca. Lebih dari itu, upaya mengungkap manipulasi sejarah Negara Islam Indonesia yang dilakukan semasa orla dan orba oleh para sejarawan merupakan suatu keberanian yang patut didukung, supaya pembaca mendapatkan informasi yang berimbang dari apa yang selama ini berkembang luas.

Kami bersyukur kepada Allah Malikurrahman atas antusiasme generasi muda Islam dalam menerima informasi yang benar dan obyektif mengenai sejarah perjuangan menegakkan Negara Islam dan berlakunya syari'at Islam di negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga perjuangan men-jadikan hukum Allah sebagai satu-satunya sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara segera terwujud di Indonesia yang, menurut sensus adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Amin, Ya Arhamar Rahimin !

# Dua Proklamasi Dalam Timbangan

**Persoalan proklamasi dan kepada pihak mana kesetiaan diberikan memerlukan penilaian yang jernih dan obyektif karena hal ini menentukan nilai diri di hadapan Allah**

[fabwany@isdb.org.sa](mailto:fabwany@isdb.org.sa)

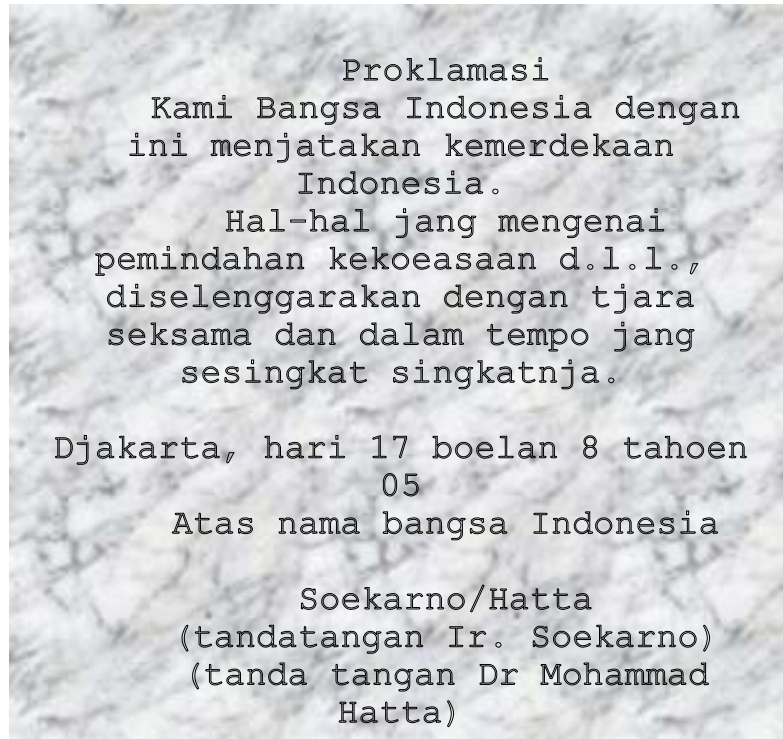
Tidak banyak orang yang menyadari dan mengetahui bahwa pada bulan Agustus ini di Indonesia pernah terjadi dua kali proklamasi, yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan proklamasi umat Islam bangsa Indonesia yang menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Kedua proklamasi tersebut merupakan kenyataan yang tidak bisa dihapus dan dihilangkan dari lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Hanya saja sangat disayangkan pada saat ini ingatan bangsa Indonesia umumnya dan khususnya kaum muslimin bangsa Indonesia hanya mengetahui dan merayakan proklamasi 17 Agustus saja, hal ini dikarenakan memang ada upaya dari pihak-pihak yang hari ini tengah berkuasa di Nusantara Indonesia untuk menghilangkan ingatan manusia dari proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949. Oleh karena itu dalam rangka menjaga dan memelihara ingatan bangsa Indonesia umumnya dan kaum muslimin bangsa Indonesia khususnya, perlu kiranya untuk menyajikan sebuah kajian dalam bentuk perbandingan dan sedikit tinjauan analitis terhadap dua buah proklamasi tersebut (17

Agustus 1945 dan 7 Agustus 1949) yang tentunya hal demikian dimaksudkan agar nilai-nilai perjuangan yang telah dirintis oleh para generasi terdahulu tetap terjaga kemurniannya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia pada umumnya. Ini dilakukan mengingat sangat pentingnya nilai sebuah proklamasi dalam kehidupan umat Islam, karena proklamasi bagi seorang mukmin berfungsi untuk :

1. Membedakan mana golongan yang mengikuti wahyu dan mana yang tidak / mana mukmin dan mana musyrik. (Qs. 6:106).
2. Pernyataan pemisahan diri dari hukum-hukum jahiliyah serta berlepas diri dari mereka yang durhaka terhadap hukum-hukum Allah. (Qs. 5:50, 10:41, 11:35-38, 26:216)
3. Pernyataan permusuhan dan kebencian (Al Wala wal Al Baro') selamalamanya terhadap orang-orang kafir sampai beriman kepada Allah saja. (Qs. 60:4)

Berdasarkan hal-hal tersebut, di bawah ini akan disajikan perbandingan antara proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 yang akan kita kaji berdasarkan apa-apa yang tersirat secara jelas dalam teks proklamasi tersebut karena masalah proklamasi adalah masalah pemihakan dan

## Proklamasi 17 Agustus 1945



kesetiaan yang pada akhirnya akan menentukan nilai diri dihadapan Allah, apakah berada dalam barisan fisibleillah atau tidak. Dengan terlebih dahulu menuliskan secara lengkap kedua bunyi teks proklamasi tersebut.

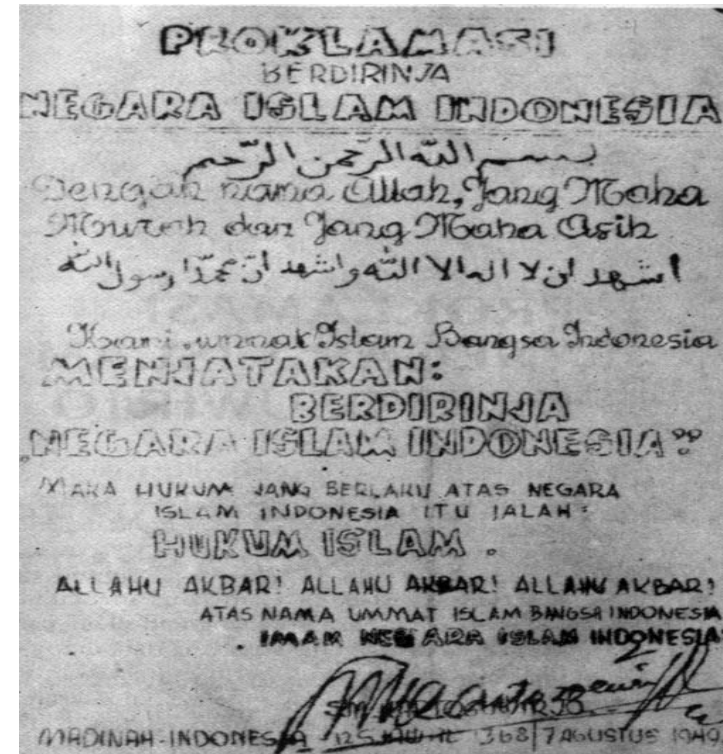
**Pada proklamasi NII dilampirkan 10 pasal:**

**Penjelasan singkat :**

1. Alhamdulillah, maka Allah berkenan menganugerahkan Kurnia-Nya yang maha besar atas Ummat Islam Bangsa

- Indonesia, ialah : Negara Kurnia Allah, yang meliputi seluruh Indonesia;
- Negara Kurnia Allah itu adalah Negara Islam Indonesia atau dengan kata lain Ad Daulatul-Islamiyah atau Darul Islam atau dengan singkatan yang sering dipakai orang, DI, selanjutnya hanya dipakai satu istilah yang resmi, yakni : Negara Islam Indonesia;
- Sejak bulan September 1945, ketika turunnya Belanda di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, atau sebulan setelah Proklamasi berdirinya Negara

## Proklamasi 7 Agustus 1949



- Republik Indonesia, maka revolusi Nasional yang dimulai menyala pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, merupakan perang sehingga sejak masa itu seluruh Indonesia dalam keadaan perang;
- Negara Islam Indonesia tumbuh pada masa perang, di tengah-tengah Revolusi nasional, yang pada akhirnya, setelah naskah Renville dan Umat Islam bangun serta bangkit melawan keganasan penjajahan dan perbudakan; yang dilakukan oleh Belanda, beralihlah sifat dan wujudnya

menjadilah revolusi Islam atau perang Suci.

- Insyah Allah, perang suci atau Revolusi Islam itu akan berjalan terus hingga;
  - NII berdiri dengan sentausa dan tegak teguhnya, keluar dan kedalam 100% de facto dan de jure di seluruh Indonesia.
  - Lenyapnya segala macam penjajahan dan perbudakan
  - Terusirnya segala musuh Allah, musuh Agama dan musuh NII

- d. Hukum-hukum Islam berlaku dengan sempurna di seluruh NII.
- e. Selama itu NII merupakan Negara Islam pada masa perang atau Darul Islam fi Waqtil-Harbi ;
6. Maka segala hukum yang berlaku dalam masa itu di dalam lingkungan NII ialah hukum Islam di masa perang,
7. Proklamasi ini disiarkan keseluruh Dunia, karena Ummat Islam Bangsa Indonesia berpendapat dan berkeyakinan bahwa kini tibalah saatnya melakukan wajib suci yang serupa itu bagi menjaga keselamatan NII dan segenap rakyatnya serta bagi memelihara kesucian Agama, terutama sekali bagi melahirkan keadilan Allah di Dunia.
8. Pada dewasa ini perjuangan kemerdekaan Nasional yang diusahakan selama hampir 4 tahun itu kandaslah sudah.
9. Semoga Allah membenarkan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia itu jua adanya.

Insy Allah, Amin.  
Bismillahir-rohmannir-rohim,  
Allahu Akbar !



Derived from the works of Mahmud Ali 1722  
"Wallahu 'alam Bishawab al-ummah"

Mudah-mudahan dengan melihat sekilas perbandingan antara dua proklamasi tersebut berikut maka akan banyak orang yang terbuka mata hatinya dan muncul kejernihannya dalam melihat kenyataan yang ada sehingga bisa selamat dari ancaman sebagai orang yang tidak turut serta dalam memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi karena lebih memilih bersama-sama dengan proklamasi yang memang semenjak awal tidak disiapkan untuk kepentingan hukum Allah. Tetapi meskipun demikian sikap kita terhadap proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebagaimana bisa dilihat dalam muqaddimah Qanun Asasi Negara Islam Indonesia yaitu bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan jembatan emas menuju datangnya kurnia Allah yang lebih besar yaitu terlaksananya hukum-hukum Allah melalui wadah

Negara Islam Indonesia.

Wallahu 'alam Bishawab

*(MJS dari berbagai sumber)*

## Analisa Perbandingan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan 7 Agustus 1949

### 17 Agustus 1945

1. Tidak ada pernyataan berdirinya Negara Republik Indonesia, hanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia
2. Tidak dimulai dengan kalimat Basmallah
3. Tidak dimulai dengan Syahadat, simbol sekulernya proklamasi tersebut
4. Tidak ada pencantuman hukum positif yang berlaku, karena sifatnya hanya pemindahan kekuasaan dari Jepang (Hukum Jahiliyah)
5. Tidak ada satupun kalimat pujian dan syukur kepada Allah
6. Tidak ditandatangani oleh seorang Imam atau Presiden atau kepala negara (karena pada saat menandatangani proklamasi Soekarno – Hatta bukan Presiden)

### 7 Agustus 1949

1. Merupakan pernyataan berdirinya sebuah negara (Negara Islam Indonesia)
2. Di mulai dengan Basmallah sebagai wujud kerendahan hati umat Islam bahwa segalanya tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari Allah SWT
3. Syahadat sebagai simbol keimanan umat Islam terhadap Allah dan pengakuan terhadap kerasulan Muhammad SAW dimana hal tersebut menjadi bukti bahwa hanya Allah semata yang berkuasa mutlak sedangkan umat Islam bangsa Indonesia hanya menjalankan kekuasaan berdasarkan tuntunan yang telah diberikan dalam Al Quran dan Hadits Shahih
4. Hukum positif yang berlaku dan mengikat semua warga yang bernaung dalam Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam (Hukum Allah) serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Islam Indonesia, selama tidak bertentangan dengan hukum tertinggi (Al Quran dan Hadits Shahih)



# Dialog Menjelang Peringatan Proklamasi

*Agustus mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di bulan inilah pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta (atas desakan para pemuda) telah memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia (1945) dan (diakui ataupun tidak) di bulan ini pula telah diproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, tepatnya tanggal 7 Agustus 1949, oleh S.M. Kartosoewiryo atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia. Tentu kenyataan seperti ini bagi sebagian orang akan cukup membingungkan, terutama bagi mereka yang mencoba mencari nilai-nilai kebenaran, memutuskan kepada wadah yang mana kesetiaan akan diberikan. Untuk lebih memahami bagaimana kondisi yang terjadi saat itu serta hal-hal apa saja yang melatar belakangi munculnya 2 proklamasi di wilayah yang sama ini, redaksi Suara Hidayah sengaja melakukan dialog dengan Abu Jibril, seorang pejuang Darul Islam, untuk mencoba menguak teka-teki yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan pembaca, dengan harapan lebih memudahkan kita dalam memahami persoalan serta membantu dalam menentukan pilihan. Mudah-mudahan*

## ***Apa pandangan Ustadz mengenai 2 (dua) proklamasi di wilayah Indonesia yang jatuh pada bulan yang sama ?***

Dalam pandangan saya, hari yang sama, bulan yang sama, atau bahkan detik yang sama sekalipun, bukanlah persoalan utama, tetapi yang lebih penting adalah adalah nyawa dan semangat proklamasi.

Proklamasi 17 Agustus 1945, nyawa dan semangatnya bukanlah Islam tetapi kebangsaan yang sekuler, terbukti dengan dicoretnya “kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya. Berbeda dengan yang difahami masyarakat awam, tujuh kalimat ini bukan berarti jaminan bagi rakyat untuk bisa melaksanakan syari’at Islam, tetapi adanya

kewajiban negara untuk menjadikan hukum Islam sebagai undang-undang yang mengatur segala aspek kehidupan muslimin di Nusantara.

Dengan pencoretan tujuh kata itu berarti Republik Indonesia sebagai sebuah negara, menyatakan tidak berkewajiban untuk menjadikan syari’at Islam sebagai undang-undang bagi muslimin. Republik Indonesia berlepas tangan dari keharusan memberlakukan undang-undang Islam sekalipun “hanya” bagi muslimin yang berada di wilayah hukumnya.

Proklamasi 7 Agustus 1949, berjiwa dan semangat Islam, dengan jelas dinyatakan dalam proklamasinya bahwa; “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas

lagi dalam undang dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits Shohih”.

Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam.

Setiap bulan Agustus penduduk Nusantara yang berjiwa Islam dihadapkan pada dua pilihan, apakah ia akan memberikan kesetiaan pada negara yang berlepas diri dari syari’at Islam, atau terbuka hati untuk bersetia pada negara yang khusus diproklamasikan untuk menegakkan syari’at Islam.

Muslimin yang memilih untuk memperingati proklamasi 17 Agustus, dia mempertegas dukungannya pada negara yang berlepas diri dari syari’at Islam, satu sikap yang tidak mungkin diberikan oleh muslimin yang berjiwa Islam.

Dengan kata lain, hanya ‘muslimin’ yang berjiwa Pancasila yang merayakan 17 Agustus, muslimin warga negara Islam berjuang ada juga yang ikut berpartisipasi, tapi bukan berarti dia “turut bersukaria”, semata mata sebagai “tuqoh” saja, lihat Q.S. Ali Imron (3) : 28.



**Tiga serangkai : Hatta, Soekarno & Sjahrir**  
*Tidak begitu suka dengan Islam*

***Menurut Ustadz apa sesungguhnya yang melatar belakangi terjadinya penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RI (peristiwa KMB) mengingat sebelumnya Belanda dengan begitu gencar berusaha merebut seluruh wilayah di Nusantara (terjadi perjanjian Linggarjati, Renville, Agresi Militer I & II bahkan penangkapan (menyerahnya) Soekarno dan Hatta), dan ketika seluruh Nusantara telah dikuasai kok dengan tiba-tiba diserahkan begitu saja kepada pihak RI ? Bagi kami hal tersebut menjadi sesuatu yang aneh dan mengundang sejumlah pertanyaan.***

Itu menyangkut persoalan “Kepentingan Nasional” masing masing negara, berikut kedekatan ideologis.

Belanda punya rencana untuk mengamankan misi ideologis dan kepentingan nasionalnya, demikian juga RI, sehingga kedekatan persamaan kepentingan ini, membuat kedua negara lebih memungkinkan untuk bersahabat ketimbang dengan Negara Islam Indonesia.

Aneh dalam kehidupan biasa, tapi tidak dalam kehidupan bernegara.

***Mungkinkah ada kesepakatan-kesepakatan antara pihak Belanda dan RI terkait dengan penyerahan kedaulatan tersebut di atas yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat (tidak tercantum dalam sejarah resmi Republik Indonesia) ?***

Jelas ada kesepakatan, jika tidak ada kesepakatan, dua buah negara tidak akan membina hubungan persahabatan, tapi mereka akan terlibat dalam situasi perang, setidaknya “perang dingin”.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencatat sejarah yang memperkuat posisinya, itu adalah hak mereka. Sebagaimana menjadi kewajiban



warga negara berjuang untuk mencatat dan membuat sejarah mereka sendiri. Jangan lupa sampai sekarang, kita tidak hanya mempelajari sejarah, tapisedang membuat sejarah perjuangan NII 1425 H dan selanjutnya.

***Ada tulisan yang menyatakan bahwa pada bulan April tahun 1949 Amir Fatah telah memproklamkan Negara Islam Jawa Tengah. Benarkah hal itu ? Kalau seandainya benar siapa yang bertindak sebagai imam dan bagaimana status proklamasi & negara tersebut hari ini ? Dan kenapa yang justru dikenal adalah proklamasi tahun 1949 ?***

Proklamasi isinya bisa menyatakan sebuah kemerdekaan (seperti Proklamasi 17 Agustus 1945), bisa berisi pernyataan merupakan bagian dari negara lain (seperti Proklamasi NII Negara Bagian Aceh).

Mungkin pada bulan April 1949, memang ada proklamasi tetapi bukan berisi pernyataan mendirikan sebuah negara, tetapi penggabungan diri dengan Negara Islam Indonesia.

Saya belum mendapatkan teks proklamasi April 1949 di Jawa Tengah tersebut, ada yang memilikinya?

***Menurut beberapa informasi, eksistensi NII (antara tahun 1950 s/d 1962) sudah diakui oleh Badan Internasional yaitu PBB, bahkan konon kabarnya bendera NII pernah berkibar bersama bendera-bendera negara lainnya di gedung PBB. Apakah ini benar adanya ? Bagaimana menurut Ustadz ?***

Memang masuk ke dalam Agenda PBB, dan daerah Jawa Barat dinyatakan sebagai "Trouble Territory".

Bendera Negara Islam Indonesia belum pernah berkibar di PBB, karena Negara Islam Indonesia sudah berdaulat ke dalam (memperoleh ketaatan dan

pembelaan dari rakyatnya) sebagai sebuah negara, tetapi belum memiliki kedaulatan ke luar, karena belum ada satu negara pun yang mengakuinya.

Keengganan RI (Jogja) untuk berunding dengan NII adalah karena tidak mau memberikan pengakuan kepada NII sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan ke luar. Sebaliknya terhadap negara Pasundan, walaupun kedaulatan ke dalamnya hanya diakui oleh beberapa puluh orang dan tidak pernah memiliki wilayah efektif, tetapi RI malah memberikan pengakuan kedaulatan kepadanya.

Inilah persoalan perjuangan diplomatik yang harus terus kita perjuangkan.

***Apa reaksi dunia internasional (PBB) khususnya negara-negara Islam yang sudah tahu keberadaan NII ketika S.M. Kartosoewirjo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan diajukan ke Mahadper (Mahkamah Angkatan Darat Keadaan Perang) pada tanggal 16 Agustus 1962 di Jakarta ?***

PBB memberikan Irian Barat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu saja.

Menyedihkan memang, tetapi itu harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat berjuang, bahwa gerak perjuangan negara mereka, harus dapat mengundang simpati baik penduduk Nusantara, maupun warga negara lainnya. Bahkan bila mungkin pengakuan negara, sehingga bisa mendirikan kedutaan berjuang di negara yang memberikan pengakuan tadi.

***Apakah benar ada usaha dari pihak S.M. Kartosoewirjo meminta grasi kepada Presiden RI. Jika benar, semangatkan apa yang melatar belakangi permintaan grasi tersebut ketika diyakini bahwa mati***

***syahid jauh lebih berharga daripada meminta pengampunan musuh ?***

Data ini masih kami kumpulkan, sehingga kami belum bisa memberikan komentar apapun.

***Proklamasi RI dipersiapkan oleh BPUPKI yang diteruskan oleh PPKI dengan sederet tokoh yang bisa dibaca hari ini. Bagaimana dengan Proklamasi NII, badan mana yang mempersiapkannya, dan siapa orang-orangnya ?***

Negara Islam diproklamasikan oleh pemerintah Negara Islam Indonesia, mungkin ada yang bertanya, mengapa negaranya belum ada tapi pemerintahnya sudah ada? Dalam perjuangan menegara hal itu adalah biasa. Hari ini pemerintah Palestina sudah ada dan terus berjuang, tetapi kita tahu, sampai hari ini Negara Palestina belumlah diproklamasikan.

Ada perjuangan panjang yang melatar belakangi lahirnya Negara Islam Indonesia, dimulai dari Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian berkembang menjadi Syarikat Islam (1912), kemudian berkembang menjadi organisasi politik yang menghendaki berdirinya sebuah negara pada 1927 dengan mengubah diri menjadi PSII (1927), dan mencapai titik kematangan pada diresmikannya sikap hijrah yang dirumuskan S.M. Kartosoewirjo sebagai Wakil Presiden PSII pada tahun 1936, kemudian mengalami pensaringan ideologis pada tahun 1940, sehingga lahir KPK-PSII. Setelah itu pembentukan kader-kader negarawan digodog di Institut Suffah di bawah pimpinan langsung S.M. Kartosoewirjo, sampai akhirnya Institut Suffah menjadi pusat pelatihan militer dengan masuknya Jepang ke Indonesia, yang berhasil melahirkan kader-kader Hizbullah dan

Sabilillah yang tetap bertahan di Jawa Barat sekalipun TNI 'hijrah' ke Jogja.

Ketika RI diproklamasikan, kegiatan "Pro-Negara Islam" tetap berjalan, walaupun tidak memperoleh publisitas, koran-koran ketika itu lebih memburu peristiwa hangat dipermukaan dari pada perkembangan janin Negara Islam Indonesia di 3 kabupaten (Garut, Tasik, Ciamis).

Ketika perjuangan RI menandatangani perjanjian Renville, maka geliat gerakan ini mulai nampak di permukaan, pada tanggal 10-11 Februari 1948 di desa Pangwedusan Distrik Cisayong, di mana harus hadir 160 wakil-wakil organisasi Islam daerah Priangan. Dalam Konferensi Cisayong ini dicetuskan tuntutan agar pemerintah RI membatalkan Perjanjian Renville, jika tidak maka akan dipersiapkan negara baru berasas Islam di Jawa Barat.

Keputusan terpenting yang diambil dalam konferensi di Cisayong adalah membekukan Masjumi di Jawa Barat dan semua cabangnya dan "membentuk pemerintah daerah dasar di Jawa Barat yang harus dita'ati oleh seluruh umat Islam di daerah tersebut", serta mendirikan *Tentara Islam Indonesia (TII)*. Dalam pemerintah dasar Jawa Barat yang diusulkan ini – *Majelis Islam* atau kadang-kadang disebut juga *Majelis Umat Islam* – organisasi-organisasi Islam yang ada harus bergabung. Ini akan menggantikan kedua Majelis Islam yang telah ada, yang didirikan di Garut dan Tasikmalaya pada tahun sebelumnya, yang sedikit banyak dibentuk atas garis yang sama. Ketua Majelis Islam ini adalah Kartosoewirjo sendiri yang juga bertanggung jawab dalam masalah pertahanan. Sebagai sekretaris diangkat Supradja, dan sebagai bendahara Sanusi Partawidjaja, sedangkan bidang penerangan

dan kehakiman masing-masing dikepalai Toha Arsjad dan Abdul Kudus Gozali Tusi.

Pada pertengahan bulan Februari 1948 dilangsungkan suatu pertemuan lain dengan tujuan memberikan bentuk yang kongkret kepada Tentara Islam Indonesia. Tidak hanya dibentuk Tentara Islam Indonesia yang sebenarnya, tetapi juga sejumlah korps khusus seperti *Baris (Barisan Rakyat Islam)* dan *PADI (Pahlawan Darul Islam)*. Juga dibentuk *Pasukan-pasukan Gestapu*. Markas besarnya didirikan di Gunung Cupu, pangkalan pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh R. Oni. Sedang R. Oni sendiri diangkat menjadi komandan daerah Tentara Islam Indonesia untuk Priangan. Dia juga menjadi komandan PADI, demikian pula menjadi kepala pasukan polisi rahasia *Mahdiyin* yang berarti terpimpin secara benar. Juga dibentuk korps polisi biasa. Mulanya badan ini disebut *Badan Keamanan Negara*, tetapi namanya diubah menjadi *Polisi Islam Indonesia*.

Pada tanggal 1-2 Maret 1948 diadakan konferensi di Cipeundeuy/Banturujeg di daerah Cirebon yang dihadiri oleh semua pimpinan cabang-cabang Masjumi daerah Jawa Barat seperti dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, dan juga para komandan TII. Selain Kartosoewirjo hadir juga Sanusi Partawidjaja, R. Oni, Toha Arsjad, Agus Abdullah, Djamil, Kiai Abdul Halim dan wakil cabang Masjumi Jakarta Gozali Tusi. Ketika semua peserta konferensi hadir Kamran membuka acara tersebut. Dalam acara itu Sanusi Partawidjaja menjelaskan keputusan-keputusan konferensi di Pangwedusan, Oni menerangkan peleburan Tentara Hizbullah dan Sabilillah menjadi Tentara Islam Indonesia.

Ketika konferensi dilanjutkan pada hari berikutnya, semua keputusan-

keputusan Pangwedusan disetujui dan Kartosoewirjo ditetapkan sebagai Imam di Jawa Barat. Keputusan berikutnya adalah Hizbullah Cirebon dilebur menjadi TII dan Kamran diangkat menjadi panglima Divisi. Selanjutnya Kartosoewirjo selaku Imam di Jawa Barat mengangkat tujuh anggota pimpinan pusat. Pimpinan Pusat tersebut dibagi tiga dan susunannya adalah sebagai berikut:

- Bagian agama terdiri dari Alim Ulama yang “modern”, yaitu Kiai Abdul Halim dan K.H. Gozali Tusi.
- Bagian politik terdiri dari Sanusi Partawidjaja dan Toha Arsjad.
- Bagian militer terdiri dari Kamran dan R. Oni.

Ketujuh orang ini diintruksikan melalui keputusan rapat tersebut untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab di seluruh Jawa Barat “hingga di seluruh Indonesia kelak”. Kemudian dari hasil rapat tersebut juga ditetapkan suatu “*Program Politik Umat Islam*” yang terdiri dari butir-butir berikut ini:

- Memboeat brosoer tentang pemetjahan politik pada dewasa ini ja’ni perloenja lahir satoe negara baroe, ja’ni Negara Islam. Pengarang Kartosoewirjo (oentoek disiarkan ke seloeroeh Indonesia).
- Mendesak kepada pemerintah Poesat Repoeblik Indonesia agar membatalkan semoea peroendingan dengan Belanda. Kalau tida’ moengkin, lebih baik Pemerintah diboeabarkan seloeroehnja dan dibentoek soeatoe pemerintah baroe dengan dasar Democratie jang sempoerna (Islam).
- Mengadakan persiapan oentoek membentoek soeatoe Negara Islam jang akan dilahirkan, bilamana: Negara Djawa Barat a la Belanda lahir, atau Pemerintah Repoeblik Indonesia boebar.

- Tiap-tiap daerah jang telah kita koeasai sedapat-dapat kita atoer dengan peratoeran Islam, dengan seidzin dan petoendjoek Imam.

Selain itu dibuat juga suatu “*Daftar Oesaha Tjepat*” yang harus menerangkan kepada rakyat bahwa perjanjian dengan Belanda tidak akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Juga seluruh pegawai Republik dan semua Umat Islam yang bekerja untuk Belanda, begitu juga semua kepala desa yang berada atau tidak berada dibawa kekuasaan Belanda, supaya secepat mungkin “berjiwa Islam”.

Ditetapkan juga untuk memperhebat penerangan tentang tauhid, amal saleh dan semangat berkorban hingga rakyat patut menjadi “warga negara Islam”. Selain itu dengan segala daya upaya faham Jihad dan ‘amal saleh harus diperdalam dan dipertinggi.

Sampai pada saat itu Kartosoewirjo beserta umat Islam masih berharap untuk dapat merealisasikan cita-citanya, yaitu pendirian Negara Islam secara legal, walaupun belum diproklamasikan secara terang-terangan, namun tidak pernah lenyap dari rencana umat Islam Jawa Barat yang akan dipersiapkan kelahirannya. Struktur militer dan pemerintah yang disusun Kartosoewirjo dan Oni, jelas dimaksudkan sebagai sebuah pemerintahan Islam yang akan menggantikan Pemerintahan Republik jika kalah dalam perang melawan Belanda.

Pada tanggal 1-5 Mei 1948 kembali diadakan konferensi yang ketiga di Cijoho, hasil terpenting yang diputuskan dalam rapat tersebut adalah perubahan nama *Madjelis Islam Pusat* menjadi *Madjlis Imamah* (kabinet) di bawah pimpinan Kartosoewirjo sebagai Imam. Madjlis Imamah itu terdiri dari lima “kementerian” yang dipimpin oleh masing-masing seorang

kepala Madjlis, kelima Madjlis tersebut adalah:

- Madjlis Penerangan di bawah pimpinan: Toha Arsjad.
- Madjlis Keuangan di bawah pimpinan: S. Partawidjaja.
- Madjlis Kehakiman di bawah pimpinan: K.H. Gozali Tusi.
- Madjlis Pertahanan di bawah pimpinan: S.M. Kartosoewirjo.
- Madjlis Dalam Negeri di bawah pimpinan: S. Partawidjaja.

Anggota Madjlis Imamah adalah Kamran sebagai Komandan Divisi TII Syarif Hidajat dan Oni sebagai Komandan Resimen Sunan Rachmat. Di samping itu dibentuk pula Madjlis Fathwa yang dipimpin oleh seorang Mufthi Besar, dan anggota-anggotanya terdiri dari para Mufthi. Tugas Madjlis Fathwa ini sebagai penasehat Imam. Keputusan penting lainnya adalah mendirikan dan menguasai satu “*Ibu Daerah Negara Islam*”, yaitu suatu daerah di mana berlaku “kekuasaan dan hukum-hukum agama Islam”, yang mana daerah ini dinamakan Daerah I (D.I), daerah di luar Daerah I dibagi-bagi menjadi Daerah II (D.II) yang hanya setengahnya dikuasai oleh umat Islam dan Daerah III (D.III), ialah daerah yang masih dikuasai oleh pihak bukan Islam (Belanda).

Pada tanggal 25 Agustus 1948, dikeluarkan Maklumat Imam No. 1 yang mempermaklumkan hadirnya pemerintahan Islam di Jawa Barat, dengan dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo sebagai Imam Pemerintah Islam Indonesia, bentukan Majlis Islam. **Struktur militer dan pemerintah yang disusun S.M. Kartosoewirjo dan Oni, jelas dimaksudkan sebagai sebuah pemerintahan Islam yang akan menggantikan Pemerintahan Republik jika kalah dalam perang melawan Belanda.**

Organisasi Negara Islam Indonesia dalam masa perang tersebut adalah organisasi yang darurat, namun masih menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara sangat mantap. Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat rapi dalam hal dokumentasi, birokrasi dan administrasinya. Pelaksanaan hukum (termasuk hukum pidana), mulai tahun 1949 adalah hukum Islam dalam masa perang sesuai dengan *Al Qur'an* Surah Al Baqarah ayat 216. Oleh karenanya Negara Islam Indonesia ketika itu masih disebut sebagai *Darul Islam fi waqtil Harbi*. Dalam masa pembentukan struktur pertama pun, struktur organisasi Negara Islam Indonesia bermula dari sebuah titik kekuasaan dan manajemen, baru kemudian terbagi dalam komandemen.

Organisasi Negara Islam Indonesia merupakan organisasi yang kaku dengan perubahan-perubahan yang mirip sebuah metamorfosa yang pada akhirnya menuju pada suatu konvergensi "sebuah negara" dengan luas wilayah meliputi seluruh Indonesia. Sejak dari awal Kartosoewirjo merencanakan agar negara Islam yang dia dirikan suatu waktu akan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Juga seluruh skema organisasi kenegaraan dan administrasi dicocokkan dengan rencana tersebut sehingga gerakan DI Kartosoewirjo merupakan gerakan *Darul Islam* dengan organisasi dan administrasi yang paling baik.

Struktur kekuasaan Negara Islam Indonesia tergambar dalam *qanun azazi* (Undang-Undang Dasar). Struktur Kekuasaannya menggabungkan antara elemen sipil dan militer sekaligus di dalam suatu *komandemen*. Kepentingan Negara Islam Indonesia ketika itu juga disesuaikan dengan keadaan politik dan militer ketika itu. Sehingga Kartosoewirjo memerintahkan, "ahli politik harus

dipermiliterkan, dan ahli militer harus diperpolitikkan." Sementara itu, lembaga legislatifnya tetaplah yang tertinggi dan sekaligus memimpin negara.

Berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) APNII No. 1, struktur Negara Islam Indonesia mengalami reorganisasi yang membawa penyederhanaan sistem administrasi secara menyeluruh yang hanya terdiri dari 5 komandemen.

Fase-fase dalam perjuangan Negara Islam Indonesia merupakan sebuah proses metamorfosis yang sangat progresif. Hal ini tercermin dari proses restrukturisasi atau reorganisasi baik militer maupun sipil, baik teritorial maupun strategis yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan dan kemajuan waktu. Dari awalnya, meski konsep *qanun azazi* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah teratur sempurna, akan tetapi belum terpakai efektif. Saat itu, fasenya adalah fase perang, sehingga mulai tahun 1949 hukum hanya dijalankan dengan pertimbangan perang dan belum ada yang sah untuk dilakukan berdasarkan hukum positif.

Pembabakan masa perjuangan ini didasarkan pada petunjuk dari perkembangan wilayah yang dikuasai. Memang dalam Islam, kekuasaan tentara *Jalut* yang raksasa dapat ditumbangkan oleh barisan tentara *Daud* yang kecil adalah karena kekuasaan tentara *Jalut* dihabisi dari pinggiran. Wilayah musuh, dalam konsep Islam juga dimasuki dan dikuasai dari pinggir-pinggirnya:

*"Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi (daerah-daerah orang kafir) lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendakNya), tidak ada*

*yang dapat menolak ketetapanNya; dan Dialah yang Maha Cepat hisabNya."* (Al-Qur'an, Ar-Ra'd 41).

Karena periodisasi gerakan ini tergantung dari kemajuan luas wilayah yang bisa diperoleh, maka perkembangannya akan tergantung dari seberapa luas daerahnya. Berjalannya waktu haruslah diukur dengan "prestasi" perolehan wilayah dan, tentunya, perencanaan "waktu kemenangan akhir" adalah juga perencanaan tentang kapan akan dikuasainya Indonesia ini bagian demi bagian.

Keputusan penting yang dilahirkan pada tahun 1948, setelah mendirikan Madjelis Imamah, maka didirikan dan sekaligus dikuasai satu "Ibu Daerah Negara Islam" (Ibukota) yaitu suatu daerah di mana "berlaku kekuasaan dan hukum-hukum agama Islam", dan diberi nama Daerah I dengan singkatan D-I. Sedangkan daerah-daerah di luar Daerah I dibagi-bagi menjadi Daerah II (D-II) yang hanya setengahnya dikuasai oleh umat Islam dan Daerah III (D-III), ialah daerah yang masih dikuasai oleh pihak bukan Islam. Kewajiban para pemimpin di daerah ini adalah mempertahankan daerah yang dikuasai serta meluaskan daerah itu dan berusaha menghubungkan Daerah I dengan Daerah II sehingga Daerah II menjadi Daerah I. Begitu juga kewajiban pemimpin di Daerah II untuk menghubungkan Daerah II dengan Daerah III sehingga Daerah III menjadi Daerah II. Sedangkan kewajiban umat Islam di Daerah II adalah mengusahakan dengan segala cara untuk menarik simpati semua penduduk yang perlu diperbaharui komitmennya terhadap Islam, sehingga mereka sadar akan kewajibannya untuk mendukung perjuangan NII. Pembentukan tiga daerah (D-I, D-II, D-III) sudah merupakan tiga

periode, sementara proses peralihan dari D-III ke D-II, satu periode; proses peralihan D-II ke D-I atau satu periode; sementara proses D-I matang menjadi "DI" satu periode; semuanya enam periode. Belum diketahui secara rinci tahun-tahun yang dilalui dari setiap periode.

Dengan demikian, sekalipun RI meninggalkan Jawa Barat, di Jawa Barat telah tersusun sebuah pemerintahan baru yang independen dan tegar menolak kedaulatan Belanda.

Pada tanggal 25 Agustus 1948 keluarlah Maklumat yang pertama dari Pemerintah Islam Indonesia yang isinya "*mengingat bahwa keadaan dewasa ini adalah keadaan perang menghadapi keganasan dan kezaliman yang dilakoeakan oleh tentara Belanda serta menimbang bahwa tiap-tiap Oemmat Islam wadjib melakoeakan Djihad fi sabilillah, oentoek menolak tiap-tiap kedjahatan dan kezaliman dan menegakkan keadilan dan kebenaran maka memoetoeskan seloeroeh pimpinan sipil dari Residen sampai kepala desa, begitoe poela pimpinan oemmat di daerah sampai di desa diberi toegas sebagai Komandan Pertahanan di daerahnja masing-masing. Seloeroeh kepala ketentaraan di desa, Ketjamatan dan selandjoetnja, diberi toegas sebagai Komando dan Pertempoeran di tempatnja masing-masing"*.

Dan dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1948 diadakan penyusunan "Qanun Asasi" yaitu Undang-undang Dasar Negara Islam Indonesia dan telah selesai. Sementara itu dalam maklumat berikutnya yang keluar pada tanggal 28 Oktober 1948, diumumkan perubahan susunan Dewan Imamah. Berhubung dengan perubahan suasana politik dunia dan pergeseran serta peralihan lapangan, sifat dan corak perjuangan politik militer di Indonesia pada dewasa ini, maka



dengan secara referendum antara anggota-anggota Dewan Imamah pada tanggal 6 Oktober 1948 telah diambil beberapa keputusan, yang mengubah seluruh susunan Pimpinan Negara dan Pimpinan Tentara, serta siasat perjuangan kedepan, menuju kepada *Mardhatillah*, yang berwujudkan Dunia Islam (Darul Islam) di dunia yang fana ini dan Darussalam di Akhirat yang baqa kelak.

Pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30 Dr. Beel Wakil Tinggi Mahkota Belanda, pengganti Van Mook memberitahukan pada delegasi RI dan KTN bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville. Dan pasukan Belanda menyerbu daerah Republik dan memulai Agresi Militer yang kedua. Kota Yogyakarta diserang oleh Belanda dari darat dan udara, dalam waktu yang cepat Belanda telah berhasil pula menawan anggota kabinet Republik di antaranya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang kemudian ditawan ke Rantau-Prapat dan Bangka. "...dia bersama banyak pemimpin lain termasuk Hatta, Sjahrir dan Suryadarma memilih untuk mengibarkan bendera putih dan menyerah."

Adapun reaksi S.M. Kartosoewirjo terhadap perkembangan terbaru ini, dia mengumumkan Jihad Fi Sabilillah, sampai semua musuh-musuh Islam, rakyat dan Allah berhasil diusir dan Negara Kurnia Allah, "*Negara Islam Indonesia (NII)*, dapat didirikan.

S.M. Kartosoewirjo menyerukan pentingnya satu kesatuan komando dan kesatuan pimpinan untuk menghindarkan politik "*Divide et impera*" Belanda di masa yang akan datang. Dan dia menerangkan, bahwa dia sebagai pimpinan Negara Islam Indonesia yakin akan sanggup untuk memegang kesatuan komando itu. Maka diumumkan kembali melalui maklumatnya

No.6 tanggapan mengenai kejatuhan pemerintah Republik Indonesia yang isinya antara lain : "*Pada tanggal 18-19 Desember 1948, tentara Belanda telah moelai menjerboe daerah Repoeblik dan pada tanggal 19 Desember 1948 Pembesar-pembesar Pemerintah Repoeblik soedah djatoeh di tangan Belanda, ditangkap dan ditawan. Dengan adanya kedjadian dan peristiwa jang amat pahit itoe, maka djatoehlah Repoeblik sebagai Negara.*

*Djangan dikira, bahwa dengan djatoehnja Pemerintah Repoeblik (Soekarno-Hatta) dan ditandatangananja soeatoe naskah keadaan akan aman dan tenteram, rakjat akan makmoer dan soeboer.*

*Tidak, sekali-kali tidak!*

*Melainkan djatoehnja Pemerintah Repoeblik Soekarno-Hatta dan pil-pahit jang terpaksa ditelan oleh rakjat itoe, insja Allah bagi Oemmat Islam, jang masih berideologi Islam, akan mendjadi sebab bangkit dan bergeraknja, mengangkat sendjata, menghadapi moesoeh djahanam.*

*Oleh sebab itoe, tiada djalan lain bagi Oemmat Islam Bangsa Indonesia, istimewa jang tinggal di daerah Repoeblik, melainkan: sanggoep menerima Koernia Allah, melakoekan Djihad fi Sabilillah, melakoekan Perang Soetji, bagi mengenjahkan segenap moesoeh Islam, moesoeh Negara dan moesoeh Allah, dan "last but not least" mendirikan Negara Koernia Allah, ialah Negara Islam Indonesia.*

*Seroean Kami: Boelatkanlah niat soetji, niat membela Agama, Negara dan Oemmat. Dengan tekad "Joeqtal aoe Jaghlib" dan dengan kejakinan jang tegoeh, bahwa Allah akan memberi perlindoengan kepada orang-orang dan Bangsa serta Oemmat jang*

*memperdjoeangkan Agama-Nja Insja Allah.*

*Kepada saudara-saudara dan handai taulan daripada Bangsa Indonesia, jang masih mengalir darah "Repoeblikainen" dalam toeboehnja dan masih berdjawa perdjoeangan: Ketahoeilah! Bahwa perdjoeangan jang kami oesahkan hingga berdirinja Negara Islam Indonesia itoe adalah kelandjoetan perdjoeangan kemerdekaan, menoeroet dan mengingat Proklamasi 17 Agoestoes 1945! Sekarang soedahlah tiba sa'atnja, segenap Bangsa Indonesia jang mengakoe tjinta Kemerdekaan, tjinta Bangsa tjinta tanah air, tjinta agama, menanggoeng wajib soetji, melakoekan perlawanan sekoeat moengkin terhadap kepada Belanda. Ketahoeilah poela! Bahwa tiada soeatoe Kemerdekaan jang dapat direboet, hanja dengan gojang-gojang kaki di atas koersi belaka. Kemerdekaan kita, kemerdekaan Negara dan Kemerdekaan Agama, haroes dan wadjib direboet kembali dengan darah!*

*Hai, Pemimpin-pemimpin Islam dan Oemmat Islam seloeroehnja! Anggaplah serboean Belanda dan djatoehnja Pemerintah Repoeblik Soekarno-Hatta itoe, sebagai Koernia Toehan, jang dengan itoe terboekalah kiranja lapangan baroe, lapangan djihad dan kesempatan jang seloeas-loeasnja oentoek menerima Koernia jang lebih besar lagi daripada Azza wa Jalla, ialah: Lahirnja Negara Islam Indonesia jang merdeka. Terimalah Koernia Allah itoe, walau agak pahit ditelannja sekalipoen."*

Dengan berakhirnya Republik di Yogyakarta -- dengan dikibarkannya bendera putih di Karesidenan Yogyakarta -- sebenarnya telah terdapat vakuum kekuasaan, yang oleh S.M. Kartosoewirjo dipandang sebagai saat yang tepat untuk memproklamasikan *Negara Islam Indonesia*. Namun dia masih tetap mencoba

untuk memperoleh pimpinan komando tertinggi secara legal. Dan S.M. Kartosoewirjo sendiri telah menyatakan bahwa perjuangannya adalah lanjutan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Dan dia berharap agar *Negara Islam Indonesia* yang sudah dia bentuk akhirnya akan dilegalisir meskipun tanpa proklamasi.

Semua usaha dari pihak TII yang mencoba untuk mengarahkan ke arah kerja sama melawan Belanda, mengalami kegagalan. Kepada kesatuan TNI diberitahukan bahwa mereka sebaiknya menempatkan diri di bawah komando *Tentara Islam Indonesia*. Dan diberitahukan pula bahwa semenjak kaburnya mereka ke Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan perjanjian Renville, sesungguhnya yang memperjuangkan Jawa Barat adalah *Tentara Islam Indonesia* bersama-sama dengan rakyat Jawa Barat bahu membahu melaksanakan wajib sucinya mempertahankan bumi Indonesia dari kekerasan dan kezaliman tentara Belanda.

Andai bukan karena peperangan yang dipaksakan "RI-Djokja" kepada NII, andai "RI-Djokja" tidak mengganggu Negara Pasundan, negara boneka buatan Belanda lebih pantas dijadikan kawan seiring dari pada NII yang gigih melawan Belanda semenjak Jawa Barat ditinggalkan RI. Andai "RI-Djokja" mau melakukan perundingan jujur dengan negara baru yang menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai hukum tertinggi ini, tentu sejarah Nusantara pasca 1945 tidak akan belepotan amis darah seperti sekarang ini.

***Apakah pada saat NII diproklamirkan ditentukan pula batas-batas yang menjadi wilayah NII, sebab pemahaman yang berkembang pada generasi sekarang seakan-akan bahwa***

*wilayah NII hanyalah sekedar Jawa Barat saja ?*

Negara Islam Indonesia mengklaim seluruh Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dimana hukum Islam ditegakkan.

Namun kemudian penguasaan wilayah memang persoalan perjuangan, dan ternyata memang pada periode awal, bermula dari sebagian Jawa Barat, kemudian meluas ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, kemudian disambut di Sulawesi Selatan dan Aceh.

Apakah kemudian nanti akan bisa menguasai seluruh Nusantara, atau menyusut dan hilang, wallahu a'lam, apabila Negara Islam Indonesia di bawah pengelolaan pemerintah berjuang dan rakyat berjuang **terbukti bermanfaat bagi manusia**, saya yakin Allah akan mempertahankan keberadaannya. Tetapi jika ternyata tidak bermanfaat, suka atau tidak suka, baik pemerintahnya saja atau bahkan pemerintah dan negaranya sekaligus, akan hilang dari muka bumi, **seperti beberapa negara yang pernah ada kemudian lenyap ditelan sejarah**. Al Quran dengan jelas menggambarkan hal ini dalam Surat Ar Ro'du (13):17.

*Pada tanggal 30 Nopember 1957 di Jakarta terjadi peristiwa yang dikenal "Peristiwa Cikini" yaitu usaha pembunuhan terhadap Soekarno. Apakah peristiwa tersebut ada hubungannya dengan perjuangan NII di bawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo ?*

Saya tidak tahu pasti tentang hal ini, ada beberapa info yang pernah saya baca, tetapi masih diteliti kebenarannya, baik faktanya maupun interpretasi atas data tadi.

*Tolong dijelaskan mengenai perbedaan pengertian kaum muslimin dengan ummat Islam, terkait dengan hadits Nabi saw yang menyatakan "aku*

*berlepas diri dari kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah orang musyrik". Begitu juga tolong dijelaskan pengertian musyrik dalam kaitan dengan hadits ini, karena ada ayat yang menyatakan kebanyakan orang beriman sambil musyrik.*

Dalam hal ini, yang ditanya tidak lebih mengerti dari pada yang bertanya, malah penanya nampak memiliki data lebih lengkap untuk menguraikan persoalan ini.

Diperlukan satu buku tersendiri untuk menjawab pertanyaan ini, Insha Allah semoga kelak ada hamba Allah, mujahid yang memudahkan Allah untuk mengerjakan jawabannya dalam bentuk sebuah buku.

*Sikap apa yang harus diberikan oleh kaum muslimin/ummat Islam menyikapi 2 proklamasi ini ?*

Diserahkan pada hati nurani dan pilihan sikap masing-masing, yang jelas apapun pilihannya, itu akan berakibat panjang hingga yaumul akhir kelak.

Saya memilih untuk hidup dan berjuang membangun Negara Kurnia Allah Negara Islam Indonesia, mungkin banyak saudara saya yang belum menentukan sikap seperti itu. Itulah seni hidup, senantiasa berada diantara dua pilihan:

- Bila saudara saya (muslim) memilih bersetia pada Negara Islam Indonesia, maka saya adalah saudaranya seagama dan senegara.
- Bila saudara saya (muslim) memilih untuk bersetia pada negara Islam lain selain NII (Kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Pakistan atau pun negara Islam berjuang lainnya), maka sesama negara Islam haram berperang, rakyatnya pun demikian, mereka adalah bersaudara, urusan politik kenegaraan diselesaikan dengan

jalan musyawarah, hingga akhirnya tercapai satu khilafah Islam di muka bumi.

- Bila saudara saya memilih bersetia pada negara non Islam (Darul Kufur) yang tidak memusuhi negara Islam, maka dia adalah saudara saya seagama, tapi bukan saudara senegara. Urusan agama kita masih bisa saling berbicara, tapi urusan negara adalah persoalan negara adalah tanggung jawab masing-masing. Paling saya hanya akan mengingatkan, bahwa sebagai seorang muslim maka tidak patut dirinya menyerahkan kesetiaan pada negara yang bukan Islam. Namun saya tidak akan memaksanya untuk keluar dari negara darul kufur yang disetiainya. Sebab kesetiaan yang dipaksakan sebenarnya bukan kesetiaan.
- Bila saudara saya (muslim) bersetia pada negara yang memusuhi negara Islam, maka sepanjang ia tidak ikut membantu negaranya untuk merugikan negara saya, saya masih diperbolehkan Allah untuk berlaku baik dan lurus dengannya. Tetapi jika secara aktif ia ikut menjalankan program negaranya untuk menyerang eksistensi negara saya, maka saya berlepas diri daripadanya.

*Mengapa proklamasi Darul Islam Indonesia dikumandangkan pada 7 Agustus 1949, tidak segera saja setelah dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta (18 Agustus 1945) ? Mengapa harus menunggu waktu sampai 4 tahun ?*

S.M. Kartosoewirjo bukanlah tipe manusia pemberontak, beliau faham betul bahwa Islam mengharamkan pemberontakan (S.16 :90) dan mewajibkan perang (S.2 :216). Perhatikan kembali apa

yang beliau lakukan di Jawa Barat pada masa ditinggalkan oleh Republik Indonesia pasca Perjanjian Renville, semua cara itu ditempuhnya agar dirinya tidak melanggar jiwa dari dua ayat di atas. Bila kita jujur menilai sejarah, maka S.M. Kartosoewirjo bukanlah seorang pemberontak, beliau adalah seorang Imam dari sebuah negara yang tidak disahabati oleh Republik Indonesia, bahkan diperanginya.

Memang S.M. Kartosoewirjo kecewa dengan dicoretinya 'tujuh kata' dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Peristiwa pencoretan itu merupakan 'pukulan telak' (*KO, Knock out*) bagi umat Islam yang sejak zaman penjajahan Belanda mendambakan diberlakukannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Kartosoewirjo pencoretan itu merupakan awal kekalahan politik Islam berhadapan dengan golongan nasionalis sekuler di saat negara Indonesia baru saja dilahirkan. Benih-benih perlawanan terhadap RI pun mulai tumbuh. **Namun demikian beliau tetap berusaha melawannya dari dalam struktur RI sendiri dengan menggalang kesadaran rakyat akan perlunya syari'at Islam ditegakkan.**

Pada bulan oktober 1945 S.M. Kartosoewirjo beserta anggota-anggota Masjumi yang lain di antaranya Wahid Hasyim dan Muhammad Natsir mengadakan pembicaraan tentang akan menjadikan Masjumi sebagai partai politik. Namun tidak ada sepakat dalam pertemuan tersebut, maka pada tanggal 7-11-1945 di Yogyakarta partai Masjumi didirikan dengan memakai nama yang lama, dan partai Masjumi sekarang ini dijadikan sebagai wahana organisasi bagi semua kelompok Islam. Masjumi dimaksudkan

agar menjadi partai politik kesatuan bagi semua Muslim, tanpa membedakan latar belakang agama, sosial pendidikan, dan ekonomi. Dalam organisasi ini S.M. Kartosoewirjo menduduki jabatan sebagai sekretaris pertama. Pada kongres itu banyak keputusan yang dapat diperoleh di antaranya ditetapkan bahwa di samping *Hizbullah*, yaitu sebuah laskar Islam (di mana anggota masih muda) yang masih tetap berdiri, dibentuk lagi sebuah laskar yang dinamakan *Sabilillah* (yang anggotanya terdiri dari generasi lebih tua). Keputusan yang lainnya adalah, bahwa umat Islam harus dipersiapkan untuk menjalankan Jihad. Dalam programnya, Masjumi merumuskan tujuannya, yaitu untuk menciptakan sebuah negara hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam.

Setelah dibentuknya partai Masyumi ini banyak sekali didirikan kantor-kantor cabang partai, mulai dari tingkat provinsi sampai ke bawah yaitu tingkat desa. Karena itu pula S.M. Kartosoewirjo mengadakan perjalanan ke Jawa Barat untuk mempersiapkan pendirian kantor pusat Masyumi Daerah Priangan.

Pada bulan Juni 1946, di Garut diadakan konferensi Masyumi Daerah Priangan dimana akan dipilih pengurus yang baru. S.M. Kartosoewirjo menunjuk K.H. Moechtar sebagai ketua umum dan dia sendiri menjadi wakil ketua. Sanusi Partawidjaja menjadi sekretaris badan pengurus, Isa Anshari dan K.H. Toha memimpin bidang informasi, sementara kepada Kamran diserahkan pimpinan *Sabilillah*. Pada konferensi tersebut S.M. Kartosoewirjo mengucapkan sebuah pidato tentang haluan politik Islam tentang pertanyaan siapa yang akan berkuasa di Indonesia. Yang mengagumkan adalah, bahwa pandangannya ke depan sangatlah tepat, sebulan setelah itu, Indonesia memang menghadapi hari-hari kritis. Di

Garut – Jawa Barat itulah, S.M. Kartosoewirjo memberikan pidato dihadapan rapat lengkap Partai Politik Islam Masyumi daerah Priangan, yang bukan saja dihadiri oleh anggota partai tersebut, tetapi juga perwakilan dari GPII, Hizbullah, *Sabilillah*, Muslimat, GPII Puteri dan undangan lainnya. Pidatonya yang terkenal tersebut kemudian diringkas sebulan kemudian dalam sebuah buku yang berjudul “Haloean Politik Islam” yang diterbitkan Dewan Penerangan Masjoemi daerah Priangan. Dari buku ini tampak jelas apa yang dimaksud S.M. Kartosoewirjo tentang cara melaksanakan Syari’at Islam di Indonesia secara menegara, di awal lahirnya RI yang disebut S.M. Kartosoewirjo sebagai Jembatan Emas, sebelum beliau memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Ini dapat kita telusuri dengan sikap dan pandangan Imam sejak tahun 1945 yang memberikan dukungan penuh terhadap RI. Apa yang Asy Syahid lakukan adalah sikap matang seorang negarawan dalam membela rakyat, dan mempertahankan sebuah negara.

S.M. Kartosoewirjo, baru memproklamasikan Negara Islam Indonesia, setelah beliau melihat kerentanan para petinggi negara Republik atas tekanan bekas penjajahnya, setelah beliau melihat Republik Indonesia tidak bisa lagi dijadikan jembatan emas untuk menegakkan syari’at Islam (lihat lampiran).

#### ***Proklamasi mana yang sah ditinjau dari sudut hukum Internasional (manusia) ataupun hukum Islam ?***

Secara hukum internasional, setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri (The right of self determination). Proklamasi adalah bagian dari hak menentukan nasib sendiri tersebut.

Persoalan berapa lama umur proklamasi itu, adalah persoalan

perjuangan. Wallahu a’lam nasib perjuangan kedua proklamasi ini masih diuji di altar sejarah.

Dari sudut hukum Islam, proklamasi mendirikan negara, sebagai lembaga tertinggi untuk melaksanakan hukum Islam, adalah tindakan yang sah demi hukum (Islam). Proklamasi untuk mendirikan negara yang tidak berdasarkan Islam adalah batal demi hukum (Islam). Seorang muslim haram hukumnya memproklamasikan sebuah negara yang bukan Islam.

#### ***Ada sebagian anggapan bahwa lahirnya proklamasi 7 Agustus 1949 didasari oleh ambisi pribadi S.M. Kartosoewirjo untuk meraih kekuasaan, bagaimana menurut Ustadz ?***

Menurut saya dan saudara saudara saya sesama rakyat Islam berjuang, tentu tidak akan ber-syu’uzhon kepada Imam pertama dari negaranya dengan tuduhan seperti itu. Bahkan saya mengakuinya sebagai Kurnia dari Allah subhanahu wa ta’ala, karena hari ini saya bisa melepaskan diri sebagai warga negara Darul Kufur dan menjadi warga negara Islam berjuang.

Dalam keyakinan saya, lebih baik menjadi warga negara Islam berjuang, dari pada bersetia pada negara berjaya, tapi darul kufur yang menjadi wadah hukum non Islam.

Rakyat negara non Islam, sangat mungkin akan memandang setiap usaha memproklamasikan negara Islam sebagai sebuah ambisi kekuasaan. Sebaliknya terhadap proklamator negaranya yang bukan Islam ia tidak akan pernah menuduh bahwa sang proklamator negaranya itu memproklamasikan negara karena sebuah ambisi kekuasaan. Ini wajar saja, bukan persoalan benar atau tidak anggapan itu, tetapi terkait dengan pemihakan ideologis.

Kalaupun benar ambisi kekuasaan, saya yakin lebih baik orang berambisi

untuk menegakkan kekuasaan Islam, walaupun untuk itu dirinya harus mati. Daripada berambisi untuk menegakkan hukum-hukum kufur di muka bumi, walaupun ia naik ke kursi kekuasaan itu atas dukungan seluruh manusia dan jin. Bagaimana menurut pendapat anda?

Justru yang saya heran, mengapa hari ini semakin sedikit orang yang berambisi untuk menegakkan kekuasaan Islam? Bahkan malu kalau dituduh berambisi untuk berkuasa dan menegakkan hukum Allah, *Innalillahi wa Inna ilayhi roji’un...*

#### ***Berkembang pula anggapan bahwa tampilnya S.M. Kartosoewirjo sebagai Imam NII merupakan bentuk pelanggaran syar’i karena tidak didahului oleh musyawarah Ummat Islam Bangsa Indonesia, atau dengan kata lain S.M. Kartosoewirjo mengangkat dirinya sendiri sebagai Imam NII. Bagaimana menurut Ustadz fakta sejarah yang sesungguhnya?***

Sejarah membuktikan bahwa adanya Konferensi Cisayong, Konferensi Cipeundeuy dan Konferensi Cijoho, menunjukkan bahwa musyawarah berkali-kali dilakukan.

Kalau persoalan rakyat Republik Indonesia dahulu, atau rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, merasa tidak diajak musyawarah, maka saya yang harus balik bertanya, *mengapa anda sampai tidak bisa diajak bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin negara Islam? Ada dimana anda waktu itu, berpihak kepada ideologi macam apa ketika itu, sampai sampai tidak hadir dalam musyawarah pengangkatan negara Islam?*

Dalam sopan santun politik, termasuk tidak sopan bila mengajak rakyat negara lain untuk bermusyawarah mengangkat kepala negara lain dari pada



negaranya sendiri. Maka dari itu musyawarah-musyawarah selanjutnya hanya berlangsung di tengah-tengah rakyat Islam berjuang saja.

Bila kemudian rakyat dari negara non Islam menganggap tidak sah pengangkatan tersebut, maka hal itu tidaklah mengherankan, sebab mereka sudah punya 'imam' sendiri, yakni pemimpin dari negara yang mereka bersetia kepadanya.

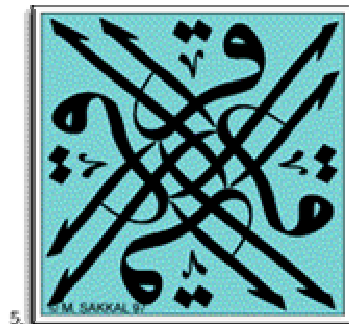
***Kalau proklamasi 7 Agustus 1949 memang jadi kesepakatan rakyat Jawa Barat, kenapa ada kasus pembelotan KH. Yusuf Taujiri yang lebih memilih mendirikan pesantren Darussalam (sebagai bentuk perlawanan terhadap Darul Islam)?***

Pertanyaan ini harusnya ditanyakan kepada KH. Yusuf Taujiri sendiri, bahkan saya pun ingin menanyakan hal yang sama, andai saya sempat berjumpa dengan KH. Yusuf Taujiri.

Kesepakatan rakyat, tidak berarti harus seluruh kaki yang berdiri di wilayah Jawa Barat menyetujuinya. Ahlul Halli wal Aqdh cukup beberapa orang, dan itu sah secara hukum fiqh.

Jangankan dalam negara berjuang, dalam negara berjaya pun banyak pembelot, dan nampaknya kita harus menanyakan langsung kepada masing-masing pembelot, atas dasar apa dirinya membelot.

Saya tidak dalam posisi untuk menjawab atas nama KH. Yusuf Taujiri, karena itu saya tidak berhak menjawab pertanyaan di atas, mohon ma'af.



# Kartosoewirjo

## Pejuang Yang Ternistakan



### Siapa S.M. Kartosoewirjo?

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo demikian nama lengkap dari Kartosoewirjo, dilahirkan 7 Januari 1907 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kota Cepu ini menjadi tempat di mana budaya Jawa bagian timur dan bagian tengah bertemu dalam suatu garis budaya yang unik.

Ayahnya, yang bernama Kartosoewirjo, bekerja sebagai mantri pada kantor yang mengkoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada masa itu mantri candu sederajat dengan jabatan Sekretaris Distrik. Dalam posisi inilah, ayah Kartosoewirjo mempunyai kedudukan yang cukup penting

*Tokoh yang satu ini, menurut berbagai pandangan masyarakat bangsa Indonesia saat ini adalah seorang pemberontak. Citranya sebagai "pemberontak", terlihat ketika dirinya berusaha menjadikan negara Indonesia menjadi sebuah Negara Islam. Namun sangatlah aneh, perjuangan yang dilakukannya itu justru mendapat sambutan yang luar biasa dari daerah-daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan, dan di Aceh. Timbul satu pertanyaan, benarkah dia itu penjahat perang sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah Republik? Atau mungkin ini sebuah penilaian yang sangat subjektif dari pemerintah Republik yang ingin berusaha melanggengkan kekuasaan tiraninya terhadap rakyat Indonesia. Sehingga diketahui, pemerintah Republik sendiri ketika selesai menjatuhkan vonis hukuman mati terhadapnya, tidak memberitahukan sedikit pun keterangan kepada pihak keluarganya di mana puseranya berada.*

sebagai seorang pribumi saat itu, menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya. Kartosoewirjo pun kemudian mengikuti tali pengaruh ini hingga pada usia remajanya.

Dengan kedudukan istimewa orang tuanya serta makin mapannya "gerakan pencerahan Indonesia" ketika itu, Kartosoewirjo dibesarkan dan berkembang. Ia terasuh di bawah sistem rasional Barat yang mulai dicangkokkan Belanda di tanah jajahan Hindia. Suasana politis ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal. Masing-masing anggota keluarganya mengembang kan visi dan arah pemikirannya ke berbagai orientasi. Ia mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 50-an yang hidup dengan penuh keguyuban, dan seorang kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api pada tahun 20-an, ketika di Indonesia terbentuk berbagai Serikat Buruh.

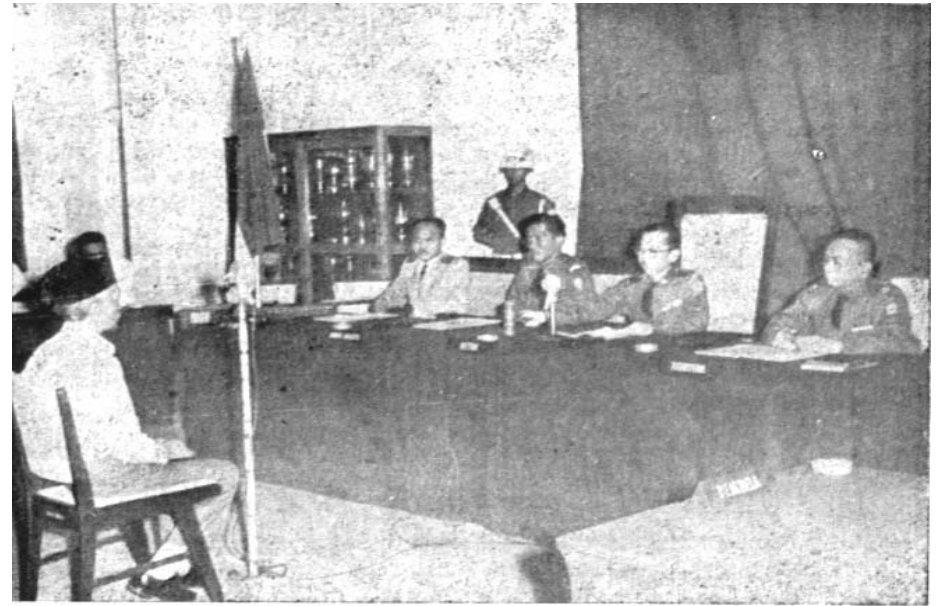
Pada tahun 1911, saat para aktivis ramai-ramai mendirikan organisasi, saat itu Kartosoewirjo berusia enam tahun dan masuk Sekolah ISTK (Inlandsche School der Tweede Klasse) atau Sekolah "kelas dua" untuk kaum Bumiputra di Pamotan. Empat tahun kemudian, ia melanjutkan sekolah ke HIS (Hollandsch-Inlandsche School) di Rembang. Tahun 1919 ketika orang tuanya pindah ke Bojonegoro, mereka memasukkan Kartosoewirjo ke sekolah ELS (Europeesche Lagere School). Bagi seorang putra "pribumi", HIS dan ELS merupakan sekolah elite. Hanya dengan kecerdasan dan bakat yang khusus yang dimiliki Kartosoewirjo maka dia bisa masuk sekolah yang direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa.

Semasa remajanya di Bojonegoro inilah Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan agama dari seorang tokoh bernama Notodihardjo yang menjadi "guru" agamanya. Dia adalah tokoh Islam modern yang mengikuti Muhammadiyah. Tidak berlebihan ketika itu, Notodihardjo sendiri kemudian menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke dalam alam pikir Kartosoewirjo. Pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi bagaimana Kartosoewirjo bersikap dalam merespon ajaran-ajaran agama Islam. Dalam masa-masa yang bisa kita sebut sebagai the formative age-nya.

Pada tahun 1923, setelah menamatkan sekolah di ELS, Kartosoewirjo pergi ke Surabaya melanjutkan studinya pada Nederlandsch Indische School (NIAS), Sekolah Kedokteran Belanda untuk Pribumi. Pada saat kuliah inilah (1926) ia terlibat dengan banyak aktivitas organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia di Surabaya.

Selama kuliah Kartosoewirjo mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Ia mulai "mengaji" secara serius. Saking seriusnya, ia kemudian begitu "terasuki" oleh shibghatullah sehingga ia kemudian menjadi Islam minded. Semua aktivitasnya kemudian hanya untuk mempelajari Islam semata dan berbuat untuk Islam saja. Dia pun kemudian sering meninggalkan aktivitas kuliah dan menjadi tidak begitu peduli dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sekolah Belanda, tentunya setelah ia mengkaji dan membaca banyak buku-buku dari berbagai disiplin ilmu, dari kedokteran hingga ilmu-ilmu sosial dan politik.

Dengan modal ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak sedikit itu, ditambah ia juga memasuki organisasi



**Persidangan rekayasa terhadap Imam NII S.M. Kartosoewirjo**  
*Sungguh setiap perjuangan memerlukan pengorbanan !*

politik Sjarikat Islam di bawah pimpinan Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Pemikiran-pemikiran Tjokroaminoto banyak mempengaruhi sikap, tindakan dan orientasi Kartosoewirjo. Maka setahun kemudian, dia dikeluarkan dari sekolah karena dituduh menjadi aktivis politik, dan didapati memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis yang diperoleh dari pamannya yaitu Marko Kartodikromo, seorang wartawan dan sastrawan yang cukup terkenal pada zamannya. Sekolah tempat ia menimba ilmu tidak berani menuduhnya karena "terasuki" ilmu-ilmu Islam, melainkan dituduh "komunis" karena memang ideologi ini sering dipandang sebagai ideologi yang akan membahayakan.

Padahal ideologi Islamlah yang sangat berbahaya bagi penguasa yang zhalim. Tidaklah mengherankan, kalau Kartosoewirjo nantinya tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kesadaran politik sekaligus memiliki integritas keislaman yang tinggi. Ia adalah seorang ulama besar, bahkan kalau kita baca tulisan-tulisannya, kita pasti akan mengakuinya sebagai seorang ulama terbesar di Asia Tenggara.

#### **Aktivitas Kartosoewirjo**

Semenjak tahun 1923, dia sudah aktif dalam gerakan kepemudaan, di antaranya gerakan pemuda Jong Java. Kemudian pada tahun 1925, ketika anggota-anggota Jong Java yang lebih mengutamakan cita-cita keislamannya mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB).

Kartosowirjo pun pindah ke organisasi ini karena sikap pemihakannya kepada agamanya. Melalui dua organisasi inilah kemudian membawa dia menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang sangat terkenal, "Sumpah Pemuda".

Selain bertugas sebagai sekretaris umum PSIHT (Partij Sjarikat Islam Hindia Timur), Kartosowirjo pun bekerja sebagai wartawan di koran harian Fajar Asia. Semula ia sebagai korektor, kemudian diangkat menjadi reporter. Pada tahun 1929, dalam usianya yang relatif muda sekitar 22 tahun, Kartosowirjo telah menjadi redaktur harian Fajar Asia. Dalam kapasitasnya sebagai redaktur, mulailah dia menerbitkan berbagai artikel yang isinya banyak sekali kritikan-kritikan, baik kepada penguasa pribumi maupun penjajah Belanda.

Ketika dalam perjalanan tugasnya itu dia pergi ke Malangbong. Di sana bertemu dengan pemimpin PSIHT setempat yang terkenal bernama Ajengan Ardiwisastera. Di sana pulalah dia berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum putri Ajengan Ardiwisastera, yang kemudian dinikahinya pada bulan April tahun 1929. Perkawinan yang sakinah ini kemudian dikarunia dua belas anak, tiga yang terakhir lahir di hutan-hutan belantara Jawa Barat. Begitu banyaknya pengalaman telah menghantarkan dirinya sebagai aktor intelektual dalam kancah pergerakan nasional.

Pada tahun 1943, ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Kartosowirjo kembali aktif di bidang politik, yang sempat terhenti. Dia masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (Madjlis Islam 'Alaa Indonesia) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis Baitul-Mal pada organisasi tersebut.

Dalam masa pendudukan Jepang ini, dia pun memfungsikan kembali

lembaga Suffah yang pernah dia bentuk. Namun kali ini lebih banyak memberikan pendidikan kemiliteran karena saat itu Jepang telah membuka pendidikan militernya. Kemudian siswa yang menerima latihan kemiliteran di Institut Suffah itu akhirnya memasuki salah satu organisasi gerilya Islam yang utama sesudah perang, Hizbullah dan Sabilillah, yang nantinya menjadi inti Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat.

Pada bulan Agustus 1945 menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, Kartosowirjo yang disertai tentara Hizbullah berada di Jakarta. Dia juga telah mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu, bahkan dia mempunyai rencana: kinilah saatnya rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sesungguhnya dia telah memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Tetapi proklamasinya ditarik kembali sesudah ada pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Untuk sementara waktu dia tetap loyal kepada Republik dan menerima dasar "sekuler"-nya.

Namun sejak kemerdekaan RI diproklamasikan (17 Agustus 1945), kaum nasionalis sekulerlah yang memegang tampuk kekuasaan negara dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan modern yang sekuler. Semenjak itu kalangan nasionalis Islam tersingkir secara sistematis dan hingga akhir 70-an kalangan Islam berada di luar negara. Dari sinilah dimulainya pertentangan serius antara kalangan Islam dan kaum nasionalis sekuler. Karena kaum nasionalis sekuler mulai secara efektif memegang kekuasaan negara, maka pertentangan ini untuk

selanjutnya dapat disebut sebagai pertentangan antara Islam dan negara.

Situasi yang kacau akibat agresi militer kedua Belanda, apalagi dengan ditandatanganinya perjanjian Renville antara pemerintah Republik dengan Belanda. Di mana pada perjanjian tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Sementara pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka menjadi pil pahit bagi Republik. Tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukannya di daerah-daerah yang dikuasai pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus ditarik mundur --atau "kabur" dalam istilah orang-orang DI-- ke Jawa Tengah. Karena persetujuan ini, Tentara Republik resmi dalam Jawa Barat, Divisi Siliwangi, mematuhi ketentuan-ketentuannya. Soekarno menyebut "kaburnya" TNI ini dengan memakai istilah Islam, "*Hijrah*". Dengan sebutan ini dia menipu jutaan rakyat Muslim. Namun berbeda dengan pasukan gerilyawan Hizbullah dan Sabilillah, bagian yang cukup besar dari kedua organisasi gerilya Jawa Barat, menolak untuk mematuhi. Hizbullah dan Sabilillah lebih tahu apa makna "*Hijrah*" itu. Pada tahun 1949 Indonesia mengalami suatu perubahan politik besar-besaran. Pada saat Jawa Barat mengalami kekosongan kekuasaan, maka ketika itu terjadilah sebuah proklamasi Negara Islam di Nusantara, sebuah negeri al-Jumhuriyah Indonesia yang kelak kemudian dikenal sebagai ad-Daulatul Islamiyah atau Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai DI/TII. DI/TII di dalam sejarah Indonesia sering disebut para pengamat yang fobi dengan Negara Islam sebagai "Islam muncul dalam wajah yang tegang." Bahkan, peristiwa ini dimanipulasi sebagai sebuah "pemberontakan". Kalaupun

peristiwa ini disebut sebagai sebuah "pemberontakan", maka ia bukanlah sebuah pemberontakan biasa. Ia merupakan sebuah perjuangan suci anti-kezaliman yang terbesar di dunia di awal abad ke-20 ini. "Pemberontakan" bersenjata yang sempat menguras habis logistik angkatan perang Republik Indonesia ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pula pemberontakan yang bersifat regional, bukan "pemberontakan" yang muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya, melainkan karena sebuah "cita-cita", sebuah "mimpi" yang diilhami oleh ajaran-ajaran Islam yang lurus.

Akhirnya, perjuangan panjang Kartosowirjo selama 13 tahun pupus setelah Kartosowirjo sendiri tertangkap. Pengadilan Mahadper, 16 Agustus 1962, menyatakan bahwa perjuangan suci Kartosowirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah "pemberontakan". Hukuman mati kemudian diberikan kepada mujahid Kartosowirjo.

Tentang kisah wafatnya Kartosowirjo, ternyata Soekarno dan A.H. Nasution cukup menyadari bahwa Kartosowirjo adalah tokoh besar yang bahkan jika wafat pun akan terus dirindukan umat. Maka mereka dengan segala konspirasinya, didukung Umar Wirahadi-kusuma, berusaha menyembunyikan rencana jahat mereka ketika mengeksekusi Imam Negara Islam ini.

Sekalipun jasad beliau telah tiada dan tidak diketahui di mana pusaranya berada karena alasan-alasan tertentu dari pemerintahan Soekarno, tapi jiwa dan perjuangannya akan tetap hidup sepanjang masa. Sejarah Indonesia telah mencatat walaupun dimanipulasi dan sekarang bertambah lagi dengan darah mujahid Asy-syahid S.M. Kartosowirjo. HARI INI KAMI MENGHORMATIMU,



BESOK KAMI BERSAMAMU! Insyah Allah. Itulah makna dari firman Allah:

*"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (bahwa mereka itu mati); bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya". (QS. 2:154).*

(Al Chaidar)

## NII Adah Djaelani

### Ditinjau Dari Sudut NII Kartosoewirjo



**Ateng Jaelani Setiawan**  
Salah satu mujahid DI yang

Mengapa NII dituduh sesat ?! Mungkin hal ini disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan beberapa kelompok yang mengatasnamakan NII yang justru sesungguhnya telah menyimpang dari aturan NII. Berikut kami kutipkan tanya jawab antara Ahmad Hakim Sudirman dengan seorang penanya untuk menjelaskan masalah tersebut

“Bapak Ahmad Sudirman yang kami hormati, pada saat ini banyak sekali jamaah yang mengatasnamakan NII atau dengan kata lain NII telah terpecah menjadi beberapa faksi, dan kebetulan saya sendiri didakwahi oleh salah satu kader NII faksi Adah Djaelani, dalam ajarannya banyak sekali yang saya ragukan. Kami minta penjelasan dari Bapak, bagaimana sesungguhnya NII Adah Djaelani ditinjau dari NII Kartosuwiryo” (Rohma Wawan)

Terimakasih saudara Rohma Wawan.

Sebagaimana yang telah saya tulis sebelum ini, bahwa dari sejak Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap oleh musuh pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, dan sebagian besar staf NII pada menyerah kepada pihak Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962, maka dari sejak tahun 1962 sampai tahun 1987 NII tidak dihancurkan atau tidak ditampilkan secara terbuka kepada umum.

Dengan alasan, pertama melanggar wasiat Imam pertama SM Kartosoewirjo, yaitu jangan dihancurkan. Kedua, mereka (sebanyak 32 orang) yang telah menyerah kepada pihak Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962 dengan menyatakan ikrar bersama, yang isinya : Demi Allah setia kepada Pemerintah RI dan tunduk kepada UUD RI 1945. Setia kepada Manifesto Politik RI, Usdek, Djarek yang telah menjadi garis besar haluan politik Negara RI. Sanggup menyerahkan tenaga dan pikiran kami guna membantu Pemerintah RI CQ alat-alat Negara RI. Selalu berusaha menjadi warga Negara RI yang taat baik dan berguna dengan dijiwai Pantja Sila.

Jadi sehubungan ada dari salah seorang staf NII Adah Djaelani Tirtapradja bersama Danu Mohamad Hasan, Ateng Djaelani Setiawan, yang mana mereka bertiga telah menyerah dan berikrar kepada pihak Soekarno pada 1 Agustus 1962, menyatakan sebagai pemimpin NII dengan membentuk susunan personalia aparatur NII pada tahun 1978 dan berlangsung sampai tahun 1987, maka dinyatakan bahwa susunan personalia aparatur NII yang dibuat mereka dianggap tidak sah dan akan ditinjau kembali oleh yang bertanggung jawab dan berhak melakukannya berdasarkan ketentuan

Undang-undang NII 1949 secara keseluruhan. (Idarul Mahdi Saefullah (Abdul Fattah Wirananggapati), Attibyhan, 13 Mei 1987, hal. 29).

Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara Rohma lebih lanjut, di sini saya tulis kembali mengenai siapa yang berhak menurut UUD NII yang meneruskan Pemerintahan NII selepas Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962.

Menurut UUD NII atau yang dinamakan Kanun Azasy NII. Itu jelas disana dicantumkan, bahwa menurut Pasal 3.

1. Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum, dalam Negara Islam Indonesia, ialah Madjlis Sjuro (Parlemen).
2. Djika keadaan memaksa, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

NII dari sejak diproklamasikan sampai Imam SM Kartosoewirjo tertangkap tanggal 4 Juni 1962, dalam keadaan darurat perang, Madjlis Sjuro belum dibentuk, maka menurut Kanun Azasy NII pasal 3 ayat 2, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

Berdasarkan dasar konstitusi inilah setiap orang yang ingin meneruskan NII Imam Kartosoewirjo harus berpijak.

Hak yang dilimpahkan oleh Madjlis Sjuro kepada Imam dan Dewan Imamah adalah hak membentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan, Maklumat, Straf Recht, Pedoman-pedoman. Misalnya, dalam mengangkat seseorang untuk menjadi Imam atau Panglima Tertinggi NII telah ditentukan dalam Pedoman Dharma Bakti (PBD) - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

Dimana Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959 merupakan produk undang-undang, hasil daripada NII berada dalam keadaan darurat perang, dimana Kanun Azasy pasal 12 ayat 2 "Imam dipilih oleh Madjlis Sjuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggauta" tidak bisa dilaksanakan.

Menurut Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959, yaitu Pimpinan KPSI (Komando Perang Seluruh Indonesia) dipimpin oleh Imam/Panglima Tertinggi. Bila satu dan lain hal ia berhalangan sehingga oleh karenanya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diangkatnyalah seorang Imam/Panglima Tertinggi selaku penggantinya dengan purbawisesa penuh

Calon pengganti Imam/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia itu diambil dari dan diantara:

-Anggota Komandemen Tertinggi (AKT)  
 -Kepala Staf Umum (KSU)  
 -Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT)  
 (Idarul Mahdi Saefullah (Abdul Fattah Wirananggapati), Attibyan, Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia, 15 Mei, Hal.17)

Jadi, Imam NII harus dipilih menurut Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

Setelah Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962, perlu diangkat Imam NII baru. Karena Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) dan Kepala Staf Umum (KSU) sudah gugur dan yang lainnya telah meninggalkan tugasnya atau

menyerah, maka yang tinggal Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT). Dimana satu-satunya Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT), yaitu Abdul Fattah Wirananggapati.

Sedangkan Ateng Djaelani Setiawan, H.Zainal Abidin, Adah Djaelani Tirtapradja, dan Atjeng Abdullah Mudjahid alias Atjeng Kurnia telah menyerah kepada pihak Soekarno.

Adapun Abdul Fattah Wirananggapati yaitu yang dibai'at langsung oleh Imam awal SM Kartosoewirjo. Sekembali Abdul Fattah Wirananggapati dari membai'at Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 september 1953 sebagai Panglima TII Divisi V-Tjik Di Tiro, ketika pulang, di Jakarta, Abdul Fattah Wirananggapati tertawan TNI dan diasingkan ke Nusakambangan. Ketika Soekarno mengeluarkan amnesti abolisi tahun 1961, Abdul Fattah Wirananggapati dibebaskan pada tahun 1963.

Tetapi Pemerintah NKRI kembali menangkap Abdul Fatah Wirananggapati tahun 1975 kemudian dipenjarakan di Bandung. Abdul Fatah Wirananggapati dipenjara dari tahun 1975 sampai tahun 1983.

Abdul Fattah Wirananggapati menjadi Imam NII dari tahun 1987 sampai tahun 1997. Adapun Imam NII pengganti Abdul Fattah Wirananggapati, sejak 8 Ramadhan 1417 H (18 Januari 1997), yaitu Ali Mahfuzh, berdasarkan MKT. No. 5 Tahun 1997.

Jadi, setelah dilakukan peninjauan tentang status NII dari sejak 1962 sampai 1987 oleh yang bertanggung jawab dan berhak melakukannya berdasarkan ketentuan

Undang-undang NII 1949 secara keseluruhan, dalam hal ini oleh Abdul Fatah Wirananggapati, maka status NII dari sejak tahun 1987, yaitu dari sejak Abdul Fattah Wirananggapati menjadi Imam NII, telah dinyatakan secara terbuka kepada umum.

Karena itu status NII SM Kartosoewirjo secara de-facto dan de-jure telah wujud dari sejak Abdul Fattah Wirananggapati menjadi Imam NII tahun 1987.

Nah sekarang, kalau memang masih ada kelompok NII lain, misalnya seperti NII yang dipimpin oleh Adah Djaelani Tirtapradja, jelas itu NII sudah dianggap tidak sah, ditinjau dari dasar hukum Kanun Azasy NII dan Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

Sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara Rohma.

1. Ummat Islam yang akan masuk menjadi warga NII tidak perlu membaca lagi syahadat, hanya cukup dengan baca baiat saja.

2. Seterusnya, kalau memang ada warga NII mau keluar dari NII tidak dianggap murtad, karena hal itu tidak tercantum dalam dasar hukum NII. Dimana yang tercantum dalam dasar hukum NII atau Straf Recht Bab IX Pasal 23 Murtad, ayat 1. Orang murtad, jaitu orang2 Islam jang mengganti ke-Islamannya dengan i'tikad dengan perkataan atau jang termaktub dalam kitab fiqh.

3. Setelah NII dijaharkan dari tahun 1987 jelas sudah tidak timbul lagi perang yang terbuka dengan pihak RI. Dan selama pihak RI tidak mendeklarkan perang, menyerang

dan menghancurkan NII, maka selama itu berlaku keadaan damai dan bukan masa perang. Karena itu Straft Recht Bab I Pasal 1 ayat 3 "Segala hukum2 Negara pada waktu ini hendaklah disesuaikan dengan hukum Sjari'at Islam dalam masa perang" tidak berlaku. Juga apa yang tercantum dalam Bab I Pasal 2 ayat 5, 2. "Ummat (rakjat) pendjadjah (Ummat Kafirin)" sudah tidak berlaku.

4. Masalah infak itu ditentukan oleh Pemerintah NII, hanya jelas tidak diwajibkan bagi rakyat atau warga NII yang menganggur, atau para pelajar dan mahasiswa yang belum ada penghasilan.

5. Soal pernikahan jelas harus menurut dasar hukum Islam yang berlaku, soal siapa yang menikahkan itu didasarkan kepada hukum nikah yang sudah berlaku menurut Islam.

6. Soal menikah dengan siapa, itu harus sesuai menurut dasar hukum Islam. Bukan karena rakyat atau non-rakyat NII

7. Selama pihak pemerintah di luar NII tidak mendeklarkan perang dan menyerang kepada NII, maka selama itu dasar hukum yang terkandung dalam Straf-Recht Bab I atau Bab II Pasal 3 Orang yang diperangi, tidak berlaku.

Adapun bunyi Teks Proklamasi NII pada tanggal 7 Agustus 1949 adalah:

"Bismillahirrahmanirrahim.  
 Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih,  
 Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah.  
 Kami Ummat Islam Bangsa Indonesia menyatakan BERDIRINYA NEGARA ISLAM INDONESIA. Maka Hukum yang

berlaku atas Negara Islam Indonesia itu, ialah HUKUM ISLAM. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia. IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA. ttd. (S.M. KARTOSOEWIRJO). Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949.

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin \*.\*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

## Peristiwa Cikini, Skenario Siapa?

**Penggranatan Bung Karno (Peristiwa Cikini) yang memakan korban sipil, selama ini selalu dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia. Benarkah demikian? Ataukah ini justru ulah intelejen RI !?**

Polisi membuka lembaran sejarah. Ahmad Kandai, ayah Abdul Jabar (tersangka bom Bali), disebut sebagai pelaku penggranatan di Cikini. Peristiwa itu memakan korban luka-luka. Sasaran utamanya, Bung Karno, justru selamat. Membuka lembaran sejarah silam itu, Bali Post menemui pelaku -- anggota jaringan penggranatan -- bernama Abdul Latif. Saat itu dia menjadi ajudan Panglima Tentara Negara Islam Indonesia (NII) Kota Jakarta Kiai Mukti. Berikut ceritanya.

Tahun 1950-an, Ahmad Kandai baru berusia belasan tahun. Baru saja akil balig. Oleh kakaknya, Saleh Ibrahim, dia dititipkan ke Abdul Latif. "Tolong ajari dan bawa adik saya ini ke hutan," kata Saleh Ibrahim. Abdul Latif sudah paham. Maksud dibawa ke hutan itu tak lain untuk belajar ilmu agama. Kelak, jika sudah dewasa, Ahmad Kandai -- yang asli Dompu -- itu biar bisa menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa. Hutan adalah sebutan pendidikan agama dan militer NII. Saat itu, imam besar NII (DI/TII) adalah Kartosoewirjo.



Derived from the works of Emin Baris (I) - Allah -

Oleh Latif, Ahmad Kandai dibawa ke hutan di daerah Heurgeulis, Jawa Barat. Di sana, Kandai diajari ngaji dan jihad. Politik, ekonomi, dan seluruh isi tafsir kitab suci Alquran. Bagi NII, hutan inilah penggembelngan tentara untuk membangun kekuatan. Ahmad Kandai adalah satu generasi penerusnya.

Tahun 1956, Kandai dikirim ke Jakarta. "Dia ingin menemui saya. Waktu itu saya sebagai pembantu (ajudan) Panglima NII Kota Jakarta Kiai Mukti. Dia dikirim oleh Panglima Komandemen Divisi I Sunan Rahmad Agus Abdullah. Di tengah perjalanan, di daerah Purwakarta, Kandai ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara," kata Latif, di Masjid Al Fatah, Menteng, Jakarta Pusat. Usia Latif kini 70 tahun. Badannya sudah renta. Tetapi, masih tersisa bekas keperkasannya sebagai militer DI/TII. Idealismenya, semangatnya, prinsip dan keteguhan sikapnya masih sangat tinggi. Namun, kondisi fisiknya mau tak mau sudah kian menyurut. Kulitnya keriput. Penyakit prostatnya pun menggerogoti kesehatannya. Dia tinggal di masjid itu. Anak istrinya ada di Cilacap. Latif asli Poso, Sulawesi.

Saat di dalam penjara itulah, peristiwa penggranatan Bung Karno di Perguruan Cikini -- saat ulah Guntur Soekarnoputra -- terjadi. Untungnya, Bung Karno selamat. Tak cedera sedikit pun. "Jadi, kalau Kandai dituduh terlibat, itu salah. Bukan dia. Tetapi tiga orang, yaitu Tasrif, Yusuf Ismail, dan Sa'dun," ingatan Latif masih segar. Setelah ditangkap, tiga orang ini langsung dieksekusi mati. Setelah kasus ini, masalah tak diam. Saleh Ibrahim -- yang Ketua Cabang Gerakan Pemuda Islam Indonesia -- dicari. Juga Wahab Pena. Mereka adalah pentolan gerakan Islam yang dituding ikut dalam jaringan Tasrif, Yusuf, dan Sa'dun. Bung Karno pun menjerat Partai Masyumi sebagai biang

kerok rencana pembunuhan terhadap presiden itu. Maka, tokoh-tokoh Masyumi pun dikejar-kejar.

Sebutlah Muhammad Natsir, Burhanuddin, Kasman Singodimejo, Syarifuddin Prawironegoro, dan Moh. Roem. Tokoh-tokoh ini melarikan diri ke Sumatera dan mendeklarasikan berdirinya PRRI/Permesta. Sejumlah tentara juga turut serta, seperti pendiri Kopassus Kawilarang dan Panglima Siliwangi. Gerakan ini pun akhirnya bisa diringkus setelah tokoh-tokohnya menyerah dan dipenjarakan. Buntutnya, Maysumi dan GPII dibubarkan. Ihwal terjadinya penggranatan di Perguruan Cikini itu, kata Latif, berawal dari pidato Bung Karno mengenai Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis). Sebagai presiden, Bung Karno tidak bisa melepaskan realitas politik di negerinya. Elemen masyarakat terdiri atas tiga komponen itu. Agar tidak saling tabrak dan berbuntut pertumpahan darah, ketiganya harus dirangkul. Disatukan demi kemajuan dan pembangunan bangsa ke depan. Ide Bung Karno ini ditolak. Sejak awal, kelompok ini menentang komunis. TNI-AD yang digawangi AH Nasution pun banyak menolak ide itu. Komunis harus bisa dienyahkan dari negeri ini. Rupanya, Bung Karno lebih memilih berbeda. Itu sebabnya, sejumlah tokoh TNI-AD pun berbelok mendukung anak-anak muda yang militan seperti Tasrif, Sa'dun, Yusuf Ismail, Wahab Pena, dan Saleh Ibrahim itu.

"Saya tahu persis. Kala itu, Kasad Zulkifli Lubis sengaja memberikan granat itu kepada kelompok ini. Granat itu lantas disimpan. Setelah memilih hari dan momentum yang tepat, dari sini (Menteng), mereka bergerak dan melemparkan granat tersebut ke arah Bung Karno," kata Latif. Sayap militer yang membenci komunis amat banyak. Tetapi, mereka tak ingin

terang-terangan menentang. "Militer sering memanfaatkan anak-anak ini," katanya.

Sebenarnya, Masyumi tak terlibat apa-apa dalam soal penggranatan itu. Sebab, tokoh-tokoh Masyumi memang tak tahu-menahu aksi itu. Cuma, penggranatan itu memiliki motif antikomunis. Masyumi juga antikomunis. "Jadi, Bung Karno langsung bisa menebak siapa di balik aksi ancaman pembunuhan terhadap dirinya itu," kata Latif. Setelah komunis tumbang tahun 1965, Saleh Ibrahim dan Wahab Pena yang tak langsung dieksekusi mati, dibebaskan Soeharto.

Rezim Soeharto saat itu justru berterima kasih karena anak-anak muda itu dianggap berani melawan komunis. Dan, benar, komunis tumbang setelah terjadi "kudeta" G-30-S. Soeharto menyebut G-30-S/PKI. Tak bermaksud memberi bantahan. Kata Latif, memang kejadian sebenarnya seperti itu. Ahmad Kandai tak tahu apa-apa soal penggranatan. Dia bebas lima tahun kemudian. Dia juga turut dibebaskan Soeharto. Tetapi, Kandai tetap diberi status tahanan kota. Selama itu pula, Kandai berbisnis.

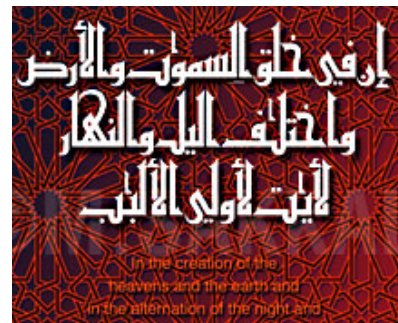
Akhirnya, Kandai meninggal tahun 1994, dengan status tetap tahanan kota. Kini, anak Kandai, Abdul Jabar, sebagai tersangka pengeboman di Bali. Kandai mewarisi jiwa dan semangat militansinya ke anak-anaknya. Tetapi, kata Latif, sejatinya Islam tak memerintahkan itu. "Anak-anak itu keliru. Untuk mencapai tujuan, dilarang menyakiti anak-anak, wanita, orangtua, apalagi mengebom. Mereka tak mengerti arti perjuangan dan prinsip," katanya. Latif mungkin percaya Abdul Jabar juga pelaku pengeboman di Bali itu.

*dikutip dari tulisan Heru B. Arifin*

### Resensi Buku Bacaan Darul Islam:

*Menelusuri Perjalanan Jihad S.M.KARTOSUWIRYO, karangan Irfan S.Awwas, Wihdah Press, Yogyakarta, 1999*

*Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. KARTOSOEWIRJO, Oleh Al Chaidar, 0Darul Falah, Jakarta, Muharram 142*



# Perjuangan Terus Berlanjut

**Siapakah pelanjut S.M. Kartosoewirjo setelah beliau dieksekusi ?  
Apakah perjuangan Negara Islam Indonesia terus berlanjut ataukah telah berakhir ?**

**Untuk menjawab masalah di atas, berikut kami kutipkan wawancara kami dengan ust. Abu Jundi, salah seorang mujahid Darul Islam yang telah banyak mengecap asam garamnya arena perjuangan. Semoga paparan yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua.**

**Setelah syahidnya S.M. Kartosoewirjo, siapa sesungguhnya pelanjut Imam Awal ini, mengingat begitu banyaknya tafsiran tentang estafeta kepemimpinan ini ?**

Dalam suasana hiruk pikuk perjuangan, dan ketika belum ada satu wilayah pun yang efektif berada dalam kontrol pemerintah Islam, maka istilah "pemimpin rakyat Islam berjuang" memang bisa ditafsirkan pada banyak makna.

- Pemimpin bisa berarti yang menggerakkan perjuangan, jika ini yang dimaksud maka di saat terputus hubungan dengan para panglima, siapapun harus berani mengambil tanggung jawab perlawanan, sebagaimana amanat Imam S.M. Kartosoewirjo tahun 1959: "Djika Imam berhalangan, dan kalian terputus hubungan

dengan Panglima, dan jang tertinggal hanja Pradjurit petit sadja maka Pradjurit petit harus sanggup tampil djadi Imam".

- Pemimpin bisa bermakna figur karismatis yang dikagumi dan dicintai karena pernah menggoreskan tinta emas perlawanan terhadap kebathilan, walaupun hari ini tidak lagi memimpin perlawanan, karena berada dalam pengawasan ketat intelligen lawan.
- Pemimpin bisa juga merupakan guru spiritual, yang dikenalnya pernah berjuang di hutan-hutan pada era perlawanan Darul Islam dahulu.
- Pemimpin bisa bermakna kepala Negara Islam Indonesia seperti kriteria perundang-undangan Negara, baik di undang-undang di masa berjuang, maupun di masa berjaya kelak.

Di saat perjuangan seperti ini, saya menyambut baik siapapun yang tumbuh dalam hatinya rasa cinta dan semangat juang untuk menegakkan Al Quran dan hadits shohieh dan bertekad untuk mempertahankan berdirinya Negara Islam Indonesia hingga hukum Islam berlaku dengan seluas-luasnya dan sesempurna-sempurnanya di atas permukaan bumi ini.

Bahwa mereka berasal dari asuhan figur pimpinan spiritual, guru pemikiran,

atau penggerak perjuangan yang berbeda, itu adalah persoalan perjuangan yang sudah merupakan kenyataan, sudah menjadi produk sejarah. Kita tidak bisa menolak kenyataan itu, kita harus menerimanya dan mengupayakan agar semakin hari semakin menuju pada apa yang digariskan oleh Dasar Negara Islam Indonesia berikut segala perundang-undangan di bawahnya.

Pada saat terjadinya tribulasi (fitnah) sebagaimana yang tahun 1959 telah diisyaratkan Imam S.M. Kartosoewirjo : “mujahid akan jadi luar mujahid, luar mujahid akan jadi mujahid, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan”, maka adanya angkatan mujahid NII di wilayah pendudukan NKRI adalah hal yang harus disyukuri. Saatnya kita menghimpun kekuatan, bukan saling menolak dengan alasan berbeda kepemimpinan.

Bahwa menghimpun kekuatan itu perlu proses, kehati-hatian dan kewaspadaan, agar tidak terjebak campur tangan pihak intellijen lawan, itu adalah persoalan perjuangan di lapangan. Paling tidak di hati setiap mujahid mesti ada rasa haru dan syukur ketika mendengar, menyaksikan ada ikhwan yang bertekad sama.

Bicara kepemimpinan negara, pasti berbicara soal pemerintah formal suatu negara yang memimpin dengan legalitas perundang-undangan negara tersebut. Namun demikian kita tidak menafikan adanya pemimpin-pemimpin non formal, yang dengan ikhlas, tetap berjuang untuk menyeru segenap muslim ke rumah mereka yang sebenarnya: *Darul Islam*.

Saya menerima dan taat kepada pemimpin formal yang mengepalai negara berjuang ini, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan pembelaan saya kepada seluruh pemimpin non formal yang telah membuat berjuta-juta muslimin terbuka hati untuk melanjutkan perjuangan

Darul Islam ini. Bahkan kepada para ustadz manapun termasuk warga negara NKRI yang telah mengajari saya untuk bersetia kepada Islam, hingga akhirnya saya menemukan negara Islam berjuang ini, saya tidak akan pernah melupakan jasa dan kebaikan mereka.

Kembali kepada pertanyaan akhi tadi, bila ditanyakan siapa pelanjut perjuangan Imam awal, maka secara perundang-undangan pasti kita harus merujuk pada MKT XI, yang secara jelas menggariskan estapeta kepemimpinan.

Perkara orangnya siapa dan mengapa tertunda dalam mengambil alih tanggung jawab pemerintahan, itu tidak lepas dari persoalan perjuangan yang menjadi ujian bagi setiap mujahid.

Andai tidak ada lawan yang berhasil menduduki wilayah yang kita klaim, andai negara kita berjaya, maka persoalan yang paling mudah dijawab adalah pertanyaan tentang **siapa dan dimana pemimpin negara**, tinggal tunjuk fotonya di layar kaca, koran atau media informasi lainnya, tinggal tunjuk kantor pusat pemerintahannya. Tetapi di tengah gentingnya suasana gerilya seperti sekarang ini, maka memang pertanyaan model ini menjadi pertanyaan yang paling hati-hati dan rumit untuk dijawab, harap maklum.

Persoalan pelik lainnya, fakta sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa anggota Dewan Imamah yang syahid, atau karena satu dan lain hal tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya, posisi tersebut terpaksa kosong tak terisi karena tekanan perjuangan yang lebih mendesak untuk dihadapi.

Seperti yang diungkap Al Chaidar dalam bukunya, bahwa:

- Kabinet pertama yang dibuat pada Konferensi Madjelis Islam Pusat di Cijoho tanggal 1-5 Mei 1948

menghasilkan kabinet dengan 5 menteri untuk pertama kalinya, yaitu Madjelis Penerangan di bawah pimpinan Kiyai Toha Arsjad, Madjelis Keuangan di bawah pimpinan Sanusi Partawidjaja, Madjelis Kehakiman di bawah pimpinan K.H. Ghozali Tusi, Madjelis Pertahanan di bawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo dan Madjelis Dalam Negeri di bawah pimpinan Sanusi Partawidjaja. Lihat Hold H. Dengel, Op.cit, hlm. 74.

- Dalam perjalanan juang kemudian terjadi perubahan:
  - Madjilis Keuangan ini dipimpin oleh Oedin Kartasasmita dan setelah meninggal diganti oleh Soelaiman Purnama.
  - Madjelis Penerangan ini dipimpin oleh Toha Arsjad dan setelah meninggal tahun 1952/1953 tidak ada penggantinya.
  - Madjelis Pertahanan ini dipimpin oleh Raden Oni dan setelah meninggal dalam pertempuran tahun 1952/1953 tidak ada penggantinya.
  - Madjelis Kehakiman ini diketuai oleh Ghozali Tusi, setelah tertawan oleh pihak Republik Indonesia, tidak ada penggantinya.
  - Madjelis Luar negeri ini dipimpin oleh Sanusi Partawidjaja, namun karena kemudian diketahui sedang menyusun suatu rencana untuk meng-coup d'etat kepemimpinan Kartosoewirjo, maka dihukum mati oleh Kartosoewirjo dan tugas ini diambil alih oleh Kartosoewirjo. Lembaga keMenterian luar negeri ini

pernah menjadi harapan ketika Van Kleef kabarnya pernah menghubungkan Darul Islam dengan lembaga-lembaga dana di Eropa dan Amerika serikat.

- Jabatan Majelis Dalam negeri dirangkap oleh Sanusi Partawidjaja, mungkin karena besarnya bidang otoritas ini dia kemudian berniat mengukudeta Kartosoewirjo, dan setelah dihukum mati oleh Kartosoewirjo, jabatan ini diambil alih oleh Kartosoewirjo.
- Demikian juga dengan Anggota Komandemen Tertinggi (AKT), ketika beberapa di antaranya turun gunung lebih dahulu dari pada Imam tertawan, maka Imam tidak sempat lagi mengangkat penggantinya. Inilah persoalan perjuangan yang terjadi, boleh jadi angkatan muda kecewa dan bertanya mengapa? Tapi bagi para pejuang awal yang siang dan malam dihujani peluru lawan, pertanyaan mengapa tadi tidak perlu dijawab lagi.
- Demikian juga KUKT, yang diangkat tahun 1953, setelah beliau tertawan sepulang tugas dari Aceh, yang kemudian diasingkan ke Nusakambangan sampai tahun 1962, juga tidak ada penggantinya.

***Ada anggapan bahwa Abdul Fatah Wirananggapati bukanlah aparat tetapi hanya sekedar orang suruhan yang diutus ke Aceh, bagaimana menurut Ustadz ?***

Mari kita buat sebuah analisa, jika benar Abdul Fatah Wirananggapati hanya orang suruhan biasa (bukan aparat lengkap dengan segala wewenang dan tugasnya), maka bagaimana mungkin Daud Beureueh diterima bay'ahnya sebagai warga Negara



Islam Indonesia dan kemudian diangkat menjadi Gubernur Militer NII oleh orang suruhan saja, negara macam apa ini?

Fakta ini saja sudah membuktikan bahwa tidak mungkin bila keberangkatan Abdul Fatah Wirananggapati ke Aceh bukan sebagai seorang aparat KUKT.

**Tahun 1953 Abdul Fatah Wirananggapati tertangkap dan ditawan; siapakah KUKT pengganti beliau ?**

Tidak ada ...

**Tidak adanya KUKT pengganti beliau apa bukan suatu keanehan ? Sebuah negara tentu tidak akan membiarkan sebuah jabatan tertentu kosong, apalagi KUKT ini suatu jabatan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan NII saat itu ?**

Bukan hanya KUKT yang ketika penanggung jawabnya – karena satu dan lain hal – tidak bisa melaksanakan tugas, kemudian dibiarkan tanpa pengganti. Seperti disebutkan di atas, inilah kenyataan perjuangan Negara Islam Indonesia di lapangan lengkap dengan segala pahit getirnya.

**Hari ini Abdul Fatah Wirananggapati sudah tidak ada, siapakah pengganti beliau ?**

Sebagai apa, sebagai KUKT seperti di tahun 1953 – 1994 atau sebagai Imam ? Jabatan KUKT pernah diisi oleh Ustadz Syahir Mubarak. Jabatannya sebagai Imam, setelah beliau dibebaskan dari tugasnya, kemudian jabatan tersebut beralih kepada Ustadz Ali Mahfud.

**Ada sebagian anggapan bahwa naiknya Ali Mahfud adalah sebuah bentuk Kudeta Terselubung, ini didasarkan kepada munculnya tulisan Sonhaji Badarujaman ?**

Bila kita merujuk pada catatan peristiwa pengangkatan Imam Ali Mahfud, dimana Bapak Abdul Fatah Wirananggapati pun ikut memilih Bapak Ali Mahfud sebagai Imam, maka anggapan kudeta terselubung itu terbantah dengan sendirinya.

Terbitnya buku yang ditulis oleh Sonhaji Badarujaman, tidak lepas dari dorongan orang dekat beliau, dan hal ini baru terungkap di awal tahun 2004. Jadi saya lebih melihat persoalan ini sebagai dilema psikologis setelah beliau tidak lagi memegang jabatan Imam.

**Apa kira-kira yang melatar belakangi munculnya tulisan Sonhaji Badarujaman dan siapa sesungguhnya Sonhaji tersebut ?**

Belum jelas benar, nampaknya hal ini perlu tabayyun lebih lanjut.

Hubungan antara Imam Ali Mahfud dengan ustadz Abdul Fatah Wirananggapati tetap terjalin baik walaupun beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Imam, juga menepis anggapan adanya kudeta terselubung tersebut. Walaupun memang diakui, untuk menghindari incaran intellijen lawan, pertemuan-pertemuan antara Imam Ali Mahfud dengan ustadz Abdul Fatah Wirananggapati, hanya berlangsung sesekali di tempat-tempat rahasia.

Ketika ustadz Abdul Fatah Wirananggapati wafat dan atas perintah Imam Ali Mahfud, beliau dinyatakan kepada khalayak, setelah selesai penguburan di samping pusara beliau, bahwa ustadz Abdul Fatah Wirananggapati adalah pahlawan nasional Negara Islam Indonesia (peristiwa sejarah ini dipublikasikan lewat pemberitaan harian Pikiran Rakyat).

**Apa sebaiknya sikap yang diambil oleh mereka yang bersepakat dengan**

**naiknya Ali Mahfud menyikapi perbedaan penafsiran di atas ?**

Diperlukan sikap cerdas, istiqomah, rendah hati, memiliki hikmah mendalam dan pandangan luas dalam menyikapi perbedaan penafsiran di wilayah pendudukan ini.

Tidak semua rakyat berjuang mengakui kepemimpinan Ali Mahfud adalah hal yang lumrah dalam keadaan negara berjuang seperti ini. Dalam negara berjaya pun ketidaksetujuan rakyat atas pemerintah bahkan bisa berlangsung sangat sengit dan keras.

Menurut saya, keadaan ini merupakan ujian yang sangat menguntungkan bagi kematangan kedua belah pihak: pihak pemerintah diuji agar semakin matang dan arif melihat keadaan rakyat berjuang yang seperti ini, pihak rakyat pun tengah melakukan proses pembelajaran politik pemerintahan dalam negara berjuang.

Yang penting, seluruh rakyat berjuang yang beresetia pada pemerintahan Ali Mahfud terus berjuang membuktikan bahwa kehadiran mereka memberi manfaat bagi ummat, pasti Allah akan mempertahankan dan terus mengembangkan kemampuan pemerintah ini, pengakuan pun akan datang dengan sendirinya secara bertahap. Tetapi jika ternyata (semoga ini tidak terjadi) pemerintahan Ali Mahfud tidak bisa membawa ummat berjuang ini pada hal-hal yang bermanfaat, maka dengan sendirinya akan hilang, sebagaimana ibrohnya Allah sebutkan dalam Q.S. Ar Ro'du (13): 17.

Bila kita berkaca pada perjuangan negara di belahan bumi lainnya, di Republik Islam Iran misalnya, pergantian kepemimpinan negara semenjak referendum hingga sekarang, berjalan sesuai dengan rumusan perundang-undangan yang telah disepakati. Sebaliknya

di Negara Islam Afghanistan, pemerintah Taliban, bukanlah bagian dari sejarah awal pembentukan negara dan pemerintah ini, tetapi ketika mereka tampil dan dengan demikian cepat, secara de facto mampu mengendalikan hampir seluruh wilayah Afghanistan, maka suka atau tidak suka, mereka harus diterima sebagai ulil amri di wilayah tersebut oleh rakyat di dalam wilayah kontrol kekuasaan Pemerintah Taliban.

Akan seperti apa perjalanan pemerintahan Islam di Indonesia? wallahu a'lam, saya hanya berdo'a: semoga Allah membimbing gerak langkah seluruh mujahid Negara Islam Indonesia, kepada setiap perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi Islam dan muslimin, Aamiin ya Robbal 'Alamiin...

**Apa yang dimaksud dengan Fillah dan Fii Sabilillah ? Kenapa 2 istilah ini bisa mencuat ke permukaan?**

Kedua istilah ini ada di dalam Al Quran, silahkan lihat Quran S. 29 :69 untuk Jihad Fillah dan S.61 :10 – 12 untuk istilah Jihad Fi Sabilillah. Penjelasan lebih akurat atas pengertian ini, silahkan merujuk pada kitab-kitab tafsir yang muktabar.

Dalam negara Islam berjuang, ternyata munculnya istilah Fillah dan Fii Sabilillah, mencuat karena alasan taktis, daripada pertimbangan ilmiah murni penafsiran ayat-ayat Al-Quran.

Ketika mulai masuk 'koloni kelima' yang merupakan rekayasa intellijen RI ke dalam gerak perjuangan Darul Islam tahun 70 an, maka gerakan ini banyak yang mulai menyimpang dari hukum-hukum perang yang sebenarnya digariskan oleh Islam, misalnya dengan adanya kekerasan terhadap warga sipil NKRI. Pihak Pak Jaja Sujadi melihat bahwa hal ini merupakan akibat dari adanya **tindakan-tindakan yang diatasnamakan jihad fisabilillah**

**namun dilakukan oleh orang yang tidak tepat pada saat yang tidak tepat.** Ini tidak lepas dari adanya permainan pancing jaring pihak intellijen RI, seperti yang dituliskan oleh Jendral Sumitro dalam buku biografinya :

- *Komando Jihad adalah hasil penggalangan Ali Moertopo melalui jaringan Hispran di Jatim. Tapi begitu keluar, langsung ditumpas oleh tentara, sehingga menjelang akhir 1970-an ditangkaplah sejumlah mantan DI/TII binaan Ali Moertopo seperti Hispran, Adah Djaelani Tirtapradja, Danu Mohammad Hassan, serta dua putra Kartosoewirjo Dodo Muhammad Darda dan Tahmid Rahmat Basuki. Kelak ketika pengadilan para mantan tokoh DI/TII itu digelar pada tahun 1980, terungkap beberapa keanehan. Pengadilan itu sendiri dicurigai sebagai upaya untuk memojokkan umat Islam. Dalam kasus persidangan Danu Mohammad Hassan umpamanya, dalam persidangan ia mengaku sebagai orang Bakin. "Saya bukan pedagang atau petani, saya pembantu Bakin." Belakangan Danu mati secara misterius, tak lebih dari 24 jam setelah ia keluar penjara, dan konon ia mati diracun. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, halaman 93).*
- *Pemanfaatan kelompok bekas-bekas DI/TII agaknya memang dianggap menguntungkan. Melalui pola "Pancing dan Jaring" para bekas DI itu dikumpulkan lantas dikorbkan (dikirim ke bui) melalui sebuah peristiwa yang semakin mengesankan bahwa Islam senantiasa berkelahi dengan ABRI, senantiasa memberontak, supaya timbul rasa*

*alergi terhadap Islam. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 94)*

- *Kelak semua rekayasa dan kerusuhan politik akan terjadi dengan memanfaatkan para bekas DI/TII yang telah digalang itu ("dipancing dan dijaring"): Peristiwa 15 Januari dengan mengorbankan kelompok Ramadi (Ramadi sendiri santer diberitakan mati secara misterius di RSPAD Gatot Soebroto), Peristiwa Komando Jihad yang antara lain membawa kematian pada diri Danu Mohammad Hasan, Peristiwa Lapangan Banteng, Peristiwa Woyla. Alhasil, semua kerusuhan itu pada dasarnya adalah produk rekayasa intelijen. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 94)*
- *Di lapangan para pelaksana kerusuhan siapa lagi kalau bukan preman-preman, tukang-tukang becak, dan gerombolan DI/TII yang didatangkan dari luar daerah. Untuk dana operasi para preman, maka Bambang Trisulo sebagai ujung tombak operasi di lapangan mengeluarkan uang sedikitnya Rp 30 juta. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 184)*
- *Setelah ikut Opsus, para bekas DI biasanya mendapat suplai keuangan secara rutin dari Opsus, maklum mereka umumnya hidup miskin. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 195)*
- *Demikian halnya dengan Ramadi sejak lama ia sudah menjalin*

*hubungan dengan orang-orang DI. Begitulah kelihatannya, sebab banyak bekas tokoh DI yang hilir-mudik di rumahnya, di antaranya Danu (bekas panglima DI Jawa Barat), Darda Kartosoewirjo (anak Kartosoewirjo). Ada pula nama-nama dengan panggilan khas, seperti Ki Acun atau Ki Mansyur. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 195)*

- *Orang-orang DI ini dibina terus oleh Ali Moertopo, hingga akhirnya mereka ditanggapi menyusul terciptanya gerakan Komando Jihad sejak tahun 1977. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 195)*
- *Menurut salah seorang anak buah Ali di Opsus, dukungan para bekas DI terhadap Opsus senantiasa kuat. Opsus rupanya selalu memelihara ilusi mengenai kemungkinan pendirian negara Islam. Di mata para bekas DI, bila Ali Moertopo menang maka ia akan mendirikan negara Islam. Tokoh-tokoh DI percaya betul atas "ucapan" Ali Moertopo tersebut. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 195)*
- *Pembinaan terhadap DI/TII antara lain ditangani oleh Kolonel Pitut Soeharto, Komandan Direktorat Opsus. Tugas utama Pitut adalah membina golongan Islam, maka dalam bertugas ia kerap bersama-sama Soedjono Hoemardani. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 196)*

▪ *Yang dibina oleh Pitut antara lain Haji Ismail Pranoto (Hispran) di Jawa Timur. Pitut juga aktif melakukan pembinaan di Jawa Barat, di antaranya Darda Kartosoewirjo, Adah Zaelani, Danu (mantan panglima komandemen DI se-Jawa dan bekas Hizbullah). (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 196)*

- *Bina-membina ini kemudian sempat membuat Pangdam Jawa Timur, Witarmin, naik pitam dan katanya mau menembak Pitut. Untung Pitut keburu tahu dan bergegas kabur keluar dari Jawa Timur. Pitut kemudian ngumpet selama berminggu-minggu di kediamannya, Tebet-Jakarta. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 196)*
- *Melalui teori "Pancing dan Jaring" yang sudah umum dipakai dalam intelijen, para bekas DI/TII itu dibina dan untuk dijerumuskan ke bui. Mereka diberi kesempatan dan dikipas untuk membuat gerakan. Nah, kalau DI kemudian bergerak maka mereka bisa terjerumus atas tuduhan ekstrimisme Islam, sehingga membuat pandangan pemerintah terhadap Islam menjadi negatif. (Heru Cahyono, Pangkokamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 196)*
- *Ada saya dengar seorang aparat Opsus dipekerjakan untuk mengawasi kantor GUPPI di Jalan Timor, terutama sejak tiga bulan sebelum Peristiwa 15 Januari. Tugas orang tersebut adalah melihatlihat, mengamati, mengawasi Ramadi cs, seperti mencatat tamu-tamu yang*

datang. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 196*)

- Ali Moertopo agaknya khawatir kalau-kalau GUPPI dibina oleh pihak lain. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 197*)
- Dari catatan tersebut, ternyata yang paling rajin bertandang ke Jalan Timor adalah Danu, seorang tokoh DI. Danu ini katanya rada aneh juga dan suka jual kecap, membual. Ia ingin dianggap penting, maka dia suka bilang, "Waduh, tadi saya habis ngobrol lama sekali di rumah Abah (begitu panggilan orang DI terhadap Ali Moertopo)." Padahal, ketika dicek Ali Moertopo hari itu jam yang sama ada pertemuan di tempat lain. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 197*)
- Yang juga sering datang adalah Kyai Abubakar Aceh, seorang tokoh Islam dari aliran Ahmadiyah. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 197*)
- Liem Bian Khoen tergolong yang paling rajin berhubungan dengan orang-orang GUPPI dari kelompok Ramadi. Selain untuk keperluan suplai dana, Liem Bian Khoen datang untuk mengawasi kegiatan GUPPI. Salah seorang bekas anak buah Ali mengemukakan, "Waktu itu sudah terasa aneh, ada urusan apa Liem Bian Khoen yang bukan muslim mondar-mandir ke kantor GUPPI dengan sedan mewah warna hitamnya." (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan*

*Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 197-198*)

- Kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya digelar oleh Opsus ini kelak akan menjadi salah satu cikal-bakal dari meletusnya Peristiwa 15 Januari. Ikut serta pula di dalam rapat-rapat tersebut adalah beberapa unsur bekas DI/TII dan unsur binaan Ali Moertopo yang berhubungan erat dengan kaki tangan Soedjono di dalam GUPPI. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 199*)
- Kadang-kadang nampak hilir-mudik Roy Simanjuntak, seorang tokoh yang suka menggalang tukang-tukang becak. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 197*)
- Ramadi, entah dengan sadar atau tidak, telah terseret pada permainan intel Opsus untuk menggerakkan massa GUPPI untuk membuat kerusuhan di Jakarta. Untuk rencana pembakaran-pembakaran Pasar Senen dan sebagainya, Ramadi mengerahkan preman-preman dan orang-orang bekas DI. Di antaranya preman-preman dan tukang becak dari sekitar Jalan Kramat Raya digalang oleh Roy Simanjuntak. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 200*)
- Ali dikenal cerdas. Sebagai orang Opsus yang kemudian banyak memasuki kehidupan intelijen, kecerdasan Ali betul-betul menonjol kala menghadapi situasi dan keadaan yang kacau, sementara pada saat dunia mulai tenang, ia bak kehilangan momentum. (Heru Cahyono,

*Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 298*)

- Maka waktu melaksanakan tugas penggalangan, modus yang digunakan biasanya dengan menciptakan kekisruhan di dalam partai atau organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi. Lantas ia muncul. Begitu pula pada peristiwa tertentu, untuk memukul orang-orang yang dianggap bisa menjadi penghalang langkah-langkah politik tertentu maka dibikinlah macam-macam seperti keributan dalam pemilu, peristiwa Yogya, peristiwa Lapangan Banteng. Direkayasa pula peristiwa Woyla (Imran), dan seterusnya. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 298-299*)
- Saya dapat informasi bahwa Woyla adalah rekayasa Opsus, lagi-lagi melalui teori "pancing dan jaring" memakai tokoh Imran yang aslinya bernama Amran. Imran ini selama lima tahun dibiayai ke Lybia untuk mempelajari ilmu terorisme dan tentang agama. Kemudian ia tiba-tiba muncul sebagai tokoh NII. Waktu tertangkap, dari mulut Imran meluncur misi apa yang dibawanya. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 299*)
- Laporan intelijen juga menyebutkan bahwa tujuan operasi "Woyla" tiada lain untuk menggoyang pemerintahan Soeharto, supaya jatuh. Selain itu hendak mendiskreditkan umat Islam, supaya nampak kesan bahwa umat Islam cenderung radikal dan senantiasa hendak menyamakan Islam dengan DI/TII. Di sini umat Islam

dijerumuskan melalui pola "Pancing dan Jaring", dirangkul untuk dijadikan kawan, lantas dikipas untuk memberontak, baru kemudian ditumpas sendiri oleh Opsus. (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 299*)

- Kecurigaan saya terhadap Peristiwa Woyla, mulai muncul, ketika ada laporan bahwa sebetulnya Pangab M. Jusuf akan membawa Awaloedin Djamin --yang notabene memiliki pasukan anti-teror -- untuk menyelesaikan kasus pembajakan tersebut. Namun, rencana Jusuf tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan Jusuf, tidak tahu siapa yang mengubahnya. Akhirnya yang berangkat bukan lagi pasukan Awaloedin Djamin, melainkan pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Sintong Pandjaitan. Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, mengapa RPKAD yang berangkat, dan bukannya polisi. Dari situ saya bisa menganalisis bahwa ada dua komando, yakni yang langsung ke jalur Pangab dan satunya lagi: jalur invisible hand ! (Heru Cahyono, *Pangkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Ibid./Opcit., halaman 299*)

Maka untuk mengurangi eksis dari jihad fi sabilillah yang tidak tepat waktu itu, maka dimunculkanlah gagasan jihad fillah yang sifatnya non violence (tanpa kekerasan) dan lebih menekankan aspek penjelasan akan keberadaan perjuangan Negara Islam Indonesia, terutama latar belakang syar'iy, historis dan ideologis yang melatar belakangi proklamasi 7 Agustus 1949.

***Hari ini kebanyakan mujahid Darul Islam awal berada di pihak Fillah. Apa ini bukan menjadi bukti bahwa yang benar adalah pihak Fillah ? Atau dengan kata lain kita harus berada dalam pimpinan Jaja Sujadi ?***

Karena pihak Fillah melakukan perjuangan yang sifatnya tanpa kekerasan, maka lebih sulit dipancing pihak intelligen RI untuk di jebak ke dalam terali besi, ini salah satu faktor yang membuat mujahid awal di pihak fillah lebih banyak yang bisa terus bebas memberikan penerangan di wilayah pendudukan NKRI. Apakah ini merupakan bukti benarnya pihak Fillah? Pada setiap pihak ada kebenarannya, ada juga kekhilafannya, inilah persoalan perjuangan, sebagaimana diisyaratkan dalam Al Quran: Tidak ada do'a mereka selain ucapan:

ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

***"Ya Robbana, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S. 3 : 147)***

Persoalan hari ini adalah, bagaimana para mujahid yang lahir dari "rahim Darul Islam" ini merentang ukhuwwah untuk mengambil ibroh dari apa yang telah terjadi, dan membuat rencana yang lebih matang ke masa depan dengan tetap berpegang pada nilai nilai Al Quran, Hadits Shohieh dan seluruh perundang-undangan Negara Islam Indonesia ini.

Pak Jaja Sujadi sekarang telah meninggal, siapa yang melanjutkan perjuangan beliau, adalah persoalan perjuangan dan silaturahmi yang terus harus ditindak lanjuti. Saya sendiri berharap lebih banyak punya kesempatan

untuk berbincang-bincang dengan saudara-saudara kami yang di pihak Fillah dan Sabilillah ini.

***Apakah klaim dari 2 negara (RI & NII) atas wilayah yang sama mengharuskan bubarnya salah satu negara, ketika sebuah negara berjaya dan mampu memaksakan kehendak atas negara saingannya ?***

Lagi-lagi ini persoalan perjuangan dan I'tikad baik dalam hubungan antar negara (internasional).

Imam Pertama Negara Islam Indonesia, bahkan pernah menawarkan satu bentuk kerjasama dengan pemerintahan Soekarno untuk sama-sama menghancurkan kekuatan komunis.

Namun nampaknya kecil kemungkinan NKRI untuk mau bersahabat dengan Negara Islam Indonesia, kita tidak bisa hanya menunggu NKRI mengulurkan persahabatan, itu terkait dengan kepentingan nasional dan persoalan internal pemerintah NKRI sendiri. Kewajiban kami adalah tetap mempertahankan berdirinya NII ini sebagaimana yang kami sumpahkan dalam bay'ah naturalisasi.

Artinya besar kemungkinan NKRI terus menerus memperlakukan kekuatan NII sebagai lawannya, namun demikian bila kekuatan NII meningkat sampai pada tingkat tidak mungkin dihancurkan atau mereka menganggap bahwa berhadapan dengan NII akan berakhir pada kehancuran parah negaranya, maka pada posisi ini perundingan menjadi mungkin dilakukan. Lihat Al Quran Surat Al Anfal (8) : 60 – 61

Tetapi jika ternyata perundingan menemukan jalan buntu, dan NKRI tetap menyatakan permusuhan bahkan melancarkan penghancuran, maka tiada pilihan bagi kami kecuali mempertahankan negara ini, sebab negara ini diproklamasikan untuk melaksanakan

syari'at Islam. Dimana iman kami, jika membiarkan negara yang didirikan untuk menegakkan syari'at Islam dihancurkan negara yang tidak berideologi Islam?

Pada kondisi inilah perang totaliter menjadi tak terhindarkan, kami cinta persahabatan antar negara, Nabi saw pun mencontohkan hubungan internasional dengan darul kufur yang mau mengikat perjanjian (darul ahdi), tetapi jika ada negara yang hendak menghancurkan negara syari'at Islam ini, pilihan kami cuma satu, ***mempertahkannya!*** Hingga kami menang atau kami syahid dalam mempertahankannya.

***Apa yang akan dilakukan NII andai suatu ketika NKRI berubah menjadi RII (Republik Islam Indonesia) ?***

Bila ini terjadi, maka kembali kepada kaidah dasar "sesama negara Islam haram berperang", bahkan wajib bahu membahu membangun ba'dhum auliyaa-u ba'din menuju khilafah Islamiyah.

Bila ini tidak terjadi, maka NII tetap akan kami pertahankan, hingga hukum syari'at Islam berlaku dengan seluas-luasnya dan sesempurna-sempurnanya. Dan dari negara berjaya inilah kami melangkah menuju khilafah Islamiyah.

***Hari ini ada istilah NII "perjuangan", apa dengan begitu, kalau seandainya NII berjaya, akan memunculkan juga istilah RI "perjuangan" ?***

Lagi-lagi itupun persoalan perjuangan, jika para mujahidin Pancasila, masih memiliki kontrak sosial dengan NKRI, maka adanya gerakan NKRI Berjuang merupakan hak bangsa Pancasila untuk mempertahankan keberadaannya. Itu adalah persoalan NKRI, bukan persoalan kami.

Kewajiban kami hanyalah melaksanakan syari'at Islam di wilayah yang bisa kami kuasai, memajukan bangsa Islam ini hingga berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, untuk kemudian melangkah bersama negara Islam lainnya membangun khilafah Islamiyah fil ardh.

***Dalam kondisi terampasnya wilayah Negara Islam Indonesia apakah berarti juga hari ini tidak ada lagi hijrah, terutama hijrah makan (hijrah tempat) ?***

Hijrah tempat memang belum bisa dilakukan, karena basis teritorial belum berhasil kita kuasai kembali. Tetapi "Al Wala wal Bara" (bersetia dan berlepas diri) merupakan tuntutan aqidah yang tidak pernah pupus. Al Quran menyatakan:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

***Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi "walijah" (teman setia) selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.9:16).***

Berkenaan dengan hijrah ini Al Akh Damar Wulan pernah menuliskan :

***Hijrah itu dilakukan semata-mata karena adanya fitnah terhadap ajaran Islam dan pemeluknya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: "Dan sesungguhnya Robbmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka mendapat fitnah, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Robbmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun***

*lagi Maha Penyayang.”* (QS. 16:110). Hadits yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah juga menegaskan hal ini: *”... Maka hijrah itu wajib atas tiap-tiap muslim yang takut difitnah karena diennya.”*

**(Damar Wulan, Hijrah dari Masa ke Masa)**

Fitnah itu sendiri diartikan sebagai: *tiap-tiap perbuatan atau apapun jua sifat dan wujudnya, yang boleh menjadi sebab akan tersesatnya manusia dari jalan kebenaran, sepanjang ajaran Islam.* Dengan sendirinya, sesuai dengan definisi tersebut, fitnah bisa merupakan sesuatu yang bersifat bathiniyah (berasal dari setiap diri pribadi), yang berupa kecenderungan kepada keduniaan (membuat lupa kepada Allah), dan bisa juga merupakan sesuatu yang bersifat lahiriah (berasal dari luar diri pribadi), yang dilancarkan oleh kaum musyrikin, baik berupa gangguan fisik ataupun pemikiran (ideologi). Kesemua bentuk fitnah itu “hadir” dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam. Dari shirah Nabawiyah dapat kita lihat bahwa fitnah yang dilancarkan pihak musyrikin Makkah, yang menjadi sebab hijrahnya kaum muslimin itu bermacam ragam bentuknya, mulai dari cara-cara yang kasar, seperti penganiayaan, pengusiran, dan pembunuhan, hingga kepada cara-cara yang halus dan menggiurkan, seperti tawaran kekuasaan kepada Nabi saw.

Dengan demikian, segala ideologi yang dilandasi oleh faham-faham di luar ajaran Islam tentang bagaimana hidup dan kehidupan ini diatur adalah merupakan bentuk fitnah ideologi. Segala sistem politik yang menjauhkan kaum muslimin dari Islam adalah merupakan bentuk fitnah politik. Segala bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh para kafirin untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al Islam

adalah merupakan bentuk fitnah fisik. Adapun hijrah itu bentuknya mestilah disesuaikan dengan bentuk fitnah yang dihadapi. Fitnah yang bersifat bathiniyah mesti dihadapi dengan hijrah dalam niat (i’tiqod), fitnah ideologi mesti dijawab dengan hijrah ideologi, fitnah politik mesti dijawab dengan hijrah politik, dan fitnah fisik mesti dijawab dengan hijrah teritorial (berpindah tempat).

Selanjutnya, hijrah itu tidak dapat dianggap sah, jika di dalam hijrah tidak dilakukan jihad. Hijrah yang tidak memakai jihad menghasilkan suatu konotasi negatif, ibarat “nahi mungkar” tapi tidak disertai “amar ma’ruf”. Hijrah tanpa jihad adalah ibarat orang yang suka mencela, tapi tidak kuasa memberikan alternatif penyelesaian dan perbaikan. Sedemikian hingga hijrah dalam niat (i’tiqod) wajib *dilanjutkan dengan jihad untuk memperbanyak amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti dzikir, sholat, dan lain-lain rupa ibadah yang bersifat khusus (pribadi). Sementara itu, hijrah ideologi mesti dilanjutkan dengan jihad mengangkat ideologi Islam ke permukaan, hijrah politik mesti dilanjutkan dengan jihad membangun sistem perpolitikan tandingan, dan hijrah teritorial mesti dilanjutkan dengan jihad membangun kekuatan militer untuk menghentikan secara paksa segala bentuk penyiksaan dan intimidasi fisik terhadap kaum muslimin.*

Hijrah dalam niat (i’tiqod) ini tampaknya baru boleh berakhir setelah maut datang menjemput, karena fitnah yang membuat kita cenderung kepada kehidupan dunia dan melupakan tugas ibadah itu tampaknya akan selalu datang (untuk menggoda) selama hayat di kandung badan. Demikian juga dengan hijrah ideologi dan hijrah politik tampaknya tidak akan pernah berakhir selama ideologi dan sistem perpolitikan non-Islam masih berdiri tetap

mengungguli ideologi dan sistem politik Islam. Singkat kata, sikap hijrah (ideologi dan politik) adalah sikap umat Islam dalam kondisi terjajah. Sehingga hijrah ini baru berakhir setelah dicapainya fatah dan falah sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah berikut ini:

*”Tidak ada hijrah setelah kemenangan (futih Makkah, terbukanya kota Makkah ke tangan muslimin), tetapi yang ada setelah itu adalah jihad dan niat.”* (Hr. Ahmad, Bukhary, Muslim dari Aisyah).

Ketika sebuah negeri telah menjadi Negara Islam (Futih), maka meninggalkan sistem kekuasaan ataupun teritorial negeri itu tidak lagi bermakna hijrah. Seperti pada masa Nabi saw, setelah Makkah berhukumkan hukum Allah, maka pergi ke Madinah bukan lagi bermakna hijrah, tetapi sebuah perjalanan (safar) saja. Sebaliknya di negeri-negeri di mana Hukum Allah belum berlaku, maka hijrah tetap menjadi sebuah kewajiban. Tegasnya, bahwa selama konfrontasi dengan musuh, sedang kita terdesak maka tetap berlaku hijrah tempat. Sabda Nabi SAW pula: *”Tidak putus hijrah selama diperangi oleh musuh”.* (H. R. Nasa’i dan Ibnu Hibban), dalam hadits lain dinyatakan *”Sesungguhnya hijrah itu tidak putus selama berlangsung jihad”* (H. R. Imam Ahmad).

***Sebagian orang menyatakan bahwa hari ini tidak perlu lagi hijrah; bentuk hijrah cukup dengan pindah dari kekafiran kepada keimanan, bersandar kepada hadits : “Tidak ada hijrah setelah futih (Mekkah)”. Bagaimana menurut Ustadz ?***

Tidak sulit untuk memahami hadits ini, pada masa Rosulullah saw, setelah Makkah menjadi bagian dari wilayah negara Islam bersama-sama dengan

Madinah, maka jelas perpindahan orang dari Makkah ke Madinah bukan lagi bermakna hijrah, tapi sebuah migrasi saja. Sebab di antara makna hijrah (*makani*) adalah keluar dari wilayah pendudukan penguasa Non Islam yang memaksa penduduk untuk memberlakukan hukum-hukum kufur pindah ke tempat di mana muslimin bisa bebas melaksanakan hukum-hukum Islam.

Tetapi bagi muslimin yang berada dalam kekuasaan hukum bukan Islam, maka kewajiban hijrah tetap berlaku buat mereka sebagaimana dijelaskan Al Akh Damar Wulan di atas.

***Dalam konteks Indonesia pasca 1945, menurut catatan sejarah mana yang lebih dulu lahir; apakah pemerintahan Islam ataupun Negara Islam Indonesia ? Bagaimana hal ini diukur dengan Sunnah Rasulullah ? Mohon dijelaskan !***

Pemerintahan lebih dulu lahir sebelum negara diproklamasikan, dan ini sesuai dengan sunnah Rosulullah saw. Di Makkah pemerintahan sudah ada, Surat Asy Syuro 38:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

*“Dan orang-orang yang menerima seruan Robb-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (Amruhum) diselenggarakan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Ayat ini diturunkan pada tahun kelima kenabian, ketika itu Rosulullah dan para shahabat berada dalam wilayah kekuasaan Jahiliyah, tetapi mereka memiliki pemerintahan sendiri. Amrun atau urusan, akan terlaksana dengan tertib bila ada Amir (pemerintah – Rosulullah saw),



Makmur (yang diperintah – para shahabat) dan keduanya terhubung dalam suatu Imaroh (pemerintahan). Dalam rumusan perjuangan kenegaraan, apa yang dilakukan Rosul dan para shahabat di Makkah itu merupakan sebuah “Pemerintahan Bayangan”.

Haji Oemar Sa'id Tjokroaminoto, pernah memuat dalam bukunya Tafsir PROGRAM ASAS dan PROGRAM TANDHIM Partai Sjarikat Islam Indonesia, yang diterbitkan pada bulan Oktober 1931

“(Dan mereka itoe (kaoem Moeslimin) jang menerima panggilan Toehannja dan mendjalankan sembahjang, dan pemerintahannja (didirikan atas) moesjawarah diantara mereka itoe, dan jang membeldjankan apa-apa jang Kami telah berikan kepadanja”).

Menoeroet faham kaoem Partai S.I Indonesia dan Djoega mengingat tjontoh-tjontoh pada zaman Choelafa'-oer-Rasjidin, pemerintahan jang dimaksoed di dalam ajat jang terseboet, terlebih-lebih boeat zaman kita sekarang ini ialah haroes soeatoe pemerintah jang kekoesaannya bersandar kepada kemaoean Rakjat (Oemmat), jang menjatakan sepenoeh-penoeh soearanja di dalam soeatoe Madjlis-oesj-sjoera', beroepa Madjlis Perwakilan Rakjat, Madjlis-Parlemen atau lain-lainnja jang seroepa itoe, jang soesoen-soesoenan hak-hak dan kewadajiban-kewadjabannja haroes berdasarkan kepada asas-asas demokrasi jang seloeas-loeasnja.

**Keterangan:** Ajat jang terseboet diatas ini diwahjoekan pada zaman Makkah (Moeslimin) itoe adalah terkandoeng noeboewah-noeboewah tentang bakal kedjadiannja pertempoeran antara bangsa Qoeraisy jang berkoeasa dengan kaoem Moeslimin jang pada ketika itoe masih sedikit bilangannja dan sebagaimana ternjata dibelakang, pendirian Negara Islam Merdeka itoelah kesoedahannja

pertempoeran jang terseboet (antara kaoem Moeslimin dan moesoeh-moesoehnja, teroetama sekali bangsa Qoeraisy). Mengingat waktoe toeroennja wahjoe maka ajat jang terseboet itoe sangat pentinglah adanja.

Didalam ajat itoe, sebagaimana biasanja kaoem Moeslimin diperintahkan mendjalankan sembahjang dan membeldjankan apa-apa jang ALLAH telah berikan kepadanja. Diantara (tengah-tengahnja) doea perintah ini, jang selamanja ada bersama-sama didalam Qoer-'an, adalah soeatoe perintah jang ketiga: **„dan pemerintahannja (didirikan atas) moesjawarah diantara mereka itoe”**.

Soedah teranglah, bahwa pada zaman Makkah jang awal, selaginja kaoem Moeslimin jang tidak banjak bilangannja itoe ada didalam tindasan dan penganijaan jang terlaloe kejam, tentoelah mereka itoe tidak begitoe sangat atau sama sekali tidak memikirkan keboetoeahan akan mempoenjai atau mendirikan soeatoe madjlis oentoe moesjawarah dan memoetoeskan perkara-perkara pemerintahan. Soenggoehpoen begitoe, diantara doea perintah jang terseboet jang menjoeroeh mendjalankan perboeatan-perboeatan ibadah, jang mendjadi dasarnja kehidoepan Moeslim, adalah soeatoe perintah jang **ketiga: mengadakan pemerintahan jang berdiri atas moesjawarah**. Ternjata dengan seterang-terangnja, bahwa perintah jang demikian itoe bermaksoed soepaja kaoem Moeslimin, waloepoen kiranja masih ada didalam tindasan, menjiapkan organisasi oentoe membitjarakan dan memoetoeskan perkara-perkara jang mengenai keperloean oemmat (*nationaal*).

Perintah ALLAH inilah menoendjoekkan, bahwa dengan njata-njata Agama Islam menetapkan dasarnja pemerintahan atau goebernemen jang bersandar kepada kemaoean Oemat dengan

djalan mengadakan madjlis-oesj-sjoera' atau parlemen, dan tjita-jita jang demikian itoe njata-njatalah telah kedjadian didalam praktek pada zaman Choelafa'-ar-rasjidin, sedangkan pada zaman itoe „pemerintahan dengan parlemen masih mendjadi impian di negeri-negeri barat”!

Lebih djaoeh njatalah didalam Hoekoem Kenegaraan dan Pemerintahan Islam (staatsen Administratif Recht: Al-Ahkam-oes-Soelthanijah), semendjak zaman doeloe soedah ada peratoeran hoekoem pilihan (kies-stelsel, dalam pada mana orang2 jang ada hak memilih (*actief kiesrecht*) dinamai „**ahl-oel-ichtjar**” atau „**ahl-oel-aqd wal hall**” jakni orang-orang jang membikin dan menghapoeskan hak akan dipilih (*passief kiesrecht*) dinamai „**ahl-oel-immamat**” jakni orang-orang toekang memegang dan mendjalankan kekoesaan (*soevereiniteit*).

Rosulullah saw dengan imaroh yang tertib semenjak di Makkah membuat posisi tawar menawar mereka demikian tinggi ketika masuk Yatsrib, sehingga walaupun jumlah muslimin hanya 10% dari total jumlah penduduk di sana, tetapi seluruh warga Yatsrib sepakat untuk menyetujui Piagam Madinah yang diantara isinya adalah menyerahkan kewenangan pemerintahan dan menegakkan keadilan di tangan Nabi Muhammad saw.

S.M. Kartosoewirjo beserta 160 tokoh-tokoh Islam yang mewakili berbagai organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, dalam beberapa konferensi menyepakati untuk membangun pemerintahan Islam, sebagai modal untuk memproklamasikan sebuah negara di masa-masa berikutnya.

Ini adalah cara yang wajar dalam perjuangan menegara, hari ini (1425H) pemerintahan Palestina sudah aktif menjalankan peran pemerintahannya

walaupun Negara Palestina belum diproklamasikan.

**Bagi sebagian orang, hancurnya perjuangan Darul Islam Indonesia (1962) menjadi bukti tidak harusnya kita berjuang mempergunakan jalur “kekerasan”. Bagaimana ini ?**

Bila kita runtut sejarah kronologis nya, seperti yang sudah dijelaskan di muka, maka siapa sebenarnya yang melakukan kekerasan dan penyerangan?

S.M.Kartosoewirjo terus menerus melakukan kontak dengan kawan-kawan seperjuangannya di daerah Republik Indonesia (Jogja) justru untuk menghindari dan menghilangkan kesalah-fahaman. Namun karena RI lebih suka menerima uluran tangan Belanda menuju Republik Indonesia Serikat, yang untuk itu ia harus menerima kehadiran Negara Pasundan sebagai saudara federalnya, maka menghancurkan pemerintahan Islam di Jawa Barat adalah sebuah kemestian bagi mereka. Pihak pemerintah Islam tidak memiliki pilihan lain kecuali mempertahankan keberadaannya.

Jika yang dimaksud dengan menghindari penggunaan jalur kekerasan adalah menghindari perlawanan bersenjata, lantas bagaimana dengan sunnah Rosulullah yang mengangkat senjata dalam mempertahankan Madinah dari serangan musuh-musuhnya?

## **55 Tahun Proklamasi NII; Sebuah Catatan Bagi Warga Berjuang**

**oleh : Jabal Thoriq**

**T**ak terasa sudah 55 tahun Negara Islam Indonesia diproklamasikan oleh Imam Asy Syahid SM. Kartosoewirjo, berbagai lembaran sejarah telah digoreskan dalam perjalanan panjang meraih kemerdekaan yang hakiki, melepaskan penghambaan manusia kepada manusia menjadi penghambaan yang mutlak hanya bagi Allah semata. Pasang surut perjalanan jihad telah terukir dengan tinta darah para syuhada, begitu pula silih bergantinya generasi yang memberanikan diri mengambil amanah estapet perjuangan suci, tetesan peluh dan keringat para mujahid yang mengalir dan membasahi bumi menjadi saksi abadi benarnya jalan yang ditempuh serta bukti baiat yang diikrarkan di hadapan pimpinan negara dan komandan tentara. Dari rahim madrasah Darul Islam ini pula telah lahir ribuan pemuda yang menyadari fungsinya diciptakan oleh Allah di dunia, untuk kemudian berjanji setia taat kepada Allah, Rasulullah dan Ulil Amri Negara Islam Indonesia. Perjuangan suci menegakkan Negara Islam Indonesia telah menjadi bagian dari mata rantai panjang parade jihad antara al haq melawan al bathil yang dimulai semenjak Adam AS, Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS, Muhammad SAW serta para salafush shaleh hingga

akhir zaman sebagai bentuk ikatan hati sesama prajurit Allah.

**“dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan mu) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 8 : 63)”**

Walaupun berjauhan tempat tetapi kerinduan hati akan tegaknya kalimat Allah menjadi tali pengikat ukhuwah islamiyah diantara para pejuang kebenaran, meleburkan segala dinding penghalang baik batas-batas teritorial, suku bangsa, bahasa bahkan ikatan darah sekalipun. Gendrang jihad telah ditabuh, benderanya telah berkibar dan suaranya bergema ke segenap penjuru alam raya membangkitkan jiwa-jiwa yang mati dan hati-hati yang tertidur untuk bangkit bersatu padu mengayun langkah menegakkan li’ i’lai’ kalimatillah demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

Usia proklamasi Negara Islam Indonesia kini tak muda lagi tetapi semangat yang terpancar dari segenap rakyatnya yang tengah berjuang terus menyala dan membara. Walaupun pahit

kenyataan yang dihadapi hari ini tetapi tetap menjadi pendorong semangat dalam mengayun langkah menapaki hari-hari dengan karya dan kerja nyata untuk memperbaiki kondisi NII yang tengah carut marut. Saat ini putra-putri NII tengah giat belajar dan menempuh berbagai jenjang pendidikan untuk memandaikan diri di luar negeri dengan berbekal iman kepada Allah dan rasa cinta terhadap negara terus tekun belajar agar kelak siap, sanggup, cukup dan cakap menjadi sumber daya unggul yang akan menghantarkan NII sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Putra-putri NII menyadari belum mampu memberikan yang terbaik bagi negara oleh karena itu seluruh potensi yang ada dikerahkan untuk memenuhi tugas menggalang Negara Kurnia Allah Negara Islam Indonesia (NKA-NII), ialah hak dan kewajiban tiap-tiap mujahid. Sementara itu orang tua dan para sesepuh perjuangan berpeluh keringat, berurai air mata bahkan bermandikan darah demi menjaga terus berlangsungnya roda perjuangan sambil tetap berdo’a kepada Allah agar perselisihan yang terjadi antara mereka dan kaum muslimin di Nusantara Indonesia segera Allah berikan jalan keluarnya, karena mereka menyadari bahwa perselisihan ini terjadi bukan karena rebutan sebidang tanah, pun bukan pula karena tidak mendapat jatah kekuasaan melainkan karena masalah perbedaan ideologi. Juga kesadaran bahwa perang yang terjadi adalah perang yang dipaksakan atas mereka, hanya karena menginginkan hidup diatur oleh hukum-hukum Allah. Pada dasarnya tidak ada keinginan untuk menumpahkan darah sesama saudara serumpun andai jalan dialog dan diplomasi terbuka. Begitu pula pemerintah berjuang NII terus memandaikan diri menyusun barisan dan memperkuat pos-pos strategis dengan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk

menjalankan roda pembangunan dan roda pemerintahan, setiap upaya diplomatik terus dilakukan baik dalam cakupan interinsuler maupun dalam lingkup internasional sehingga perjuangan yang dilakukan tidak bersifat lokal serta insidental.

Negara Islam Indonesia, diakui ataupun tidak, sempat mengalami masa de facto dan de jure selama 13 tahun semenjak diproklamasikannya, berbagai daerah di Nusantara menyatakan diri bergabung dengan NII semisal Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Jawa Tengah dan lain-lain. Tetapi kemudian batas-batas teritorial NII berhasil direbut oleh musuh yang menyebabkan garis demarkasi teritorial tersebut terangkat dari bumi ke langit berubah menjadi ‘*furqon*’ dalam hati, selanjutnya perjuangan NII mengalami masa-masa kritis yang ditandai dengan datangnya gelombang fitnah yang merontokkan sebagian besar mujahidin juga perbedaan faham sekitar estapeta kepemimpinan yaitu mengenai siapa yang berhak menjadi Imam sepeninggal Imam Awal SM. Kartosoewirjo. Perbedaan dan perselisihan yang terjadi kemudian melemahkan para gerilyawan NII dan menguntungkan musuh, hingga tulisan ini dibuat gerilyawan NII menjadi buruan aparat lawan, masing-masing berjalan dengan pemahamannya sendiri.

Sebagai warga berjuang, dalam memperingati 55 tahun proklamasi ini mari mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan untuk negara tercinta sehingga tidak terjebak dengan sesuatu yang sifatnya seremonial belaka dan semangat sesaat yang kemudian hilang bersama berlalunya waktu. Hari ini NII, menurut Imam Kedua Abdul Fatah Wirananggoro dalam At Tibyan, tengah mengalami 3 kekalahan, yaitu :

1. Kekalahan hilangnya daerah-daerah de facto
2. Kekalahan Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII) dalam pertempuran
3. Kekalahan propaganda oleh musuh

Oleh karenanya melihat dari hal di atas maka upaya yang dilakukan sekarang adalah terus berusaha maksimal dalam mengembalikan tiga hal diatas, yaitu:

1. Mengembalikan daerah-daerah de facto ke dalam pangkuan Negara Islam Indonesia semisal Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dll. (mengembalikan teritorial)
2. Mengembalikan kekuatan tempur Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII) sehingga seimbang dengan musuh baik jumlah personelnya, peralatan perangnya maupun keterampilannya. (mengembalikan aparat)
3. Menghilangkan propaganda negatif (*black propaganda*) yang menyebabkan buruknya citra NII baik dimata kaum muslimin di Nusantara Indonesia maupun di luar negeri yang dilakukan oleh musuh, mulai operasi intelijen yang dilakukan dengan menciptakan satuan-satuan TII palsu untuk merampok dan membunuh warga tidak berdosa sampai dengan menciptakan struktur palsu KW IX yang sengaja dibuat sebagai '*kaki lima (koloni kelima)*' untuk bergerak atas nama NII tetapi pada hakikatnya merusak nama baik NII. (mengembalikan citra)

Hal-hal diatas selayaknya menjadi agenda dalam setiap peringatan '*milad*' NII sehingga momentum proklamasi menjadi sarana mengukur diri sejauh mana efektifitas dari aktivitas yang dilakukan.

Contohnya apakah hari ini teritorial terkecil (desa) di lingkungan NII seimbang baik secara jumlah penduduk, potensi maupun sumber daya yang dimiliki dengan desa di lingkungan NKRI ?. Hitung-hitungan paling sederhana adalah dalam jumlah penduduk yang kalau kita merujuk kepada Al Qur'an maka perbandingan yang ideal adalah 1 : 10 sampai batas maksimal 1 : 2.

***“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara mu, mereka dapat mrngalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS Al Anfal 8 : 65-66)”***

Tentunya perimbangan jumlah tadi merupakan perhitungan yang diikuti dengan kualitas yang memadai sehingga warga berjuang memang telah memenuhi standar dan layak untuk ditolong Allah dalam menghadapi musuh agama dan musuh negara.

Bila dimisalkan dengan manusia, seharusnya 55 tahun usia proklamasi NII adalah ibarat manusia setengah baya yang telah mencapai kematangan secara fisik, psikologis maupun spiritual. Tetapi kondisi NII hari ini tidaklah seperti itu, saat ini NII

tengah terus berjuang menggapai kemerdekaannya sehingga mampu tegak berdiri diatas kaki dan menjadi tuan di rumah sendiri. Carut marut serta silih bergantinya masalah yang datang menyebabkan sampai saat ini NII masih belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai wadah untuk menegakkan hukum-hukum Allah secara sempurna, hal itu akan dapat terlaksana manakala seluruh warga berjuang yang hari ini berwala kepada pemerintah yang sah NKA NII memaksimalkan daya dan usahanya dalam berjung sehingga cita-cita dari Konferensi Cisayong, menegakkan kedaulatan NII secara de facto dan de jure teguh ke dalam dan ke luar; Ke dalam mampu melaksanakan hukum-hukum syariat Islam dengan seluas-luasnya, ke luar mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia, menjadi kenyataan.

Dalam momentum 55 tahun proklamasi NII ini mari kita teguhkan dan perbaharui kembali janji untuk tetap menegakkan li' 'i la i' kalimatillah serta mempertahankan berdirinya Negara Islam Indonesia hingga hukum syariat Islam seluruhnya berlaku dengan seluas-luasnya dalam kalangan umat Islam bangsa Indonesia di Indonesia. Sehingga hari ini lebih baik dari kemarin serta agar kita bisa menatap masa depan dengan lebih baik dan agar perjuangan ini bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Wallahu a' lam bishawab.